

**STRATEGI NEGOSIASI PEMERINTAH SWEDIA TERHADAP NEGARA
TURKI DALAM UPAYA MERATIFIKASI KEANGGOTAAN NATO**

TAHUN 2023

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD SYADDAD HISBULLAH

19323198

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**STRATEGI NEGOSIASI PEMERINTAH SWEDIA TERHADAP NEGARA
TURKI DALAM UPAYA MERATIFIKASI KEANGGOTAAN NATO**

TAHUN 2023

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

MUHAMMAD SYADDAD HISBULLAH

19323198

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**STRATEGI NEGOSIASI PEMERINTAH SWEDIA TERHADAP NEGARA
TURKI DALAM UPAYA MERATIFIKASI KEANGGOTAAN NATO
TAHUN 2023**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan
Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam
memperoleh derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
2. Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.

Tanda Tangan

Min
Rezky
Aswar

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 26 Desember 2023

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '99EAKX773231185'.

Muhammad Syaddad Hisbullah

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
HALAMAN PENGESAHAN	3
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	7
ABSTRAK	8
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Kerangka Pemikiran	8
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	14
1.8.4 Proses Penelitian	14
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB 2	16
UPAYA YANG DILAKUKAN NEGARA SWEDIA UNTUK BERGABUNG MENJADI ANGGOTA NATO	16
2.1. Pergeseran Sikap Netral Dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Swedia	16
2.1.1 Hubungan negara Swedia dengan Rusia pasca Perang Dingin	20
2.1.2 Hubungan yang terjalin antara negara Swedia dengan NATO (North Atlantic Treaty Organization)	23
2.2. Kebijakan Negara Swedia Untuk Bergabung Dengan NATO	25
2.2.1 Hubungan Bilateral dan Respon Turki dalam Melihat Keanggotaan Swedia di NATO	26
2.3. Dinamika Perjalanan dan Upaya Negosiasi Swedia Terhadap Turki Untuk Bergabung Menjadi Anggota NATO.	29
2.3.1 Upaya Swedia Terhadap Turki Dalam Meratifikasi Keanggotaan di NATO Tahun 2022	30
2.3.2 Upaya Swedia Terhadap Turki Dalam Meratifikasi Keanggotaan di NATO Tahun 2023	35
BAB 3	41

STRATEGI <i>PROBLEM SOLVING</i> YANG DILAKUKAN NEGARA SWEDIA DALAM MENDORONG NEGARA TURKI UNTUK MERATIFIKASI KEANGGOTAAN NATO	41
3.1. Upaya Swedia Dalam Mendorong Turki Meratifikasi Keanggotaan NATO Dilihat Melalui Strategi <i>Exchanging Concessions</i>	42
3.2. Upaya Swedia Dalam Mendorong Turki Meratifikasi Keanggotaan NATO Dilihat Melalui Strategi <i>Expanding the pie</i>	44
3.3. Upaya Swedia Dalam Mendorong Turki Meratifikasi Keanggotaan NATO Dilihat dalam bentuk <i>Solving Underlying Concerns</i>	47
BAB 4	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2 Rekomendasi	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 3.3 Analisis Strategi <i>Problem Solving</i> Swedia Terhadap Turki	51
--	----

ABSTRAK

Swedia merupakan salah satu negara Skandinavia dan Nordik yang menerapkan prinsip netralitas pada kebijakan luar negeri selama kurang lebih 200 tahun. Namun akibat adanya invasi besar-besaran Rusia di Ukraina menyebabkan perubahan konsep keamanan dan mengganggu stabilitas keamanan negara Swedia. Adanya ancaman tersebut membuat Swedia mengambil keputusan untuk menjadi anggota NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) dan mengakhiri 200 tahun kebijakan netralitas yang dianut oleh negara tersebut. Turki yang merupakan salah satu anggota NATO menolak untuk meratifikasi keanggotaan Swedia dikarenakan gerakan terorisme *Partiya Karkeren Kurdistan* atau PKK yang mencari perlindungan di negara Swedia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Strategies and Tactic in Negotiation* dalam bentuk strategi *Problem Solving* dalam melihat bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan oleh Swedia terhadap Turki agar menyetujui protokol aksesinya Swedia di NATO. Penelitian ini akan menjawab bagaimana strategi Swedia dalam bernegosiasi dengan Turki sebagai upaya agar Turki menyetujui protokol aksesinya Swedia di NATO tahun 2022-2023.

Kata-kata kunci: *Swedia, Turki, NATO, Strategi dan taktik negosiasi, Problem Solving*

ABSTRACT

Sweden is one of the Scandinavian and Nordic countries that has applied the principle of neutrality in foreign policy for approximately 200 years. However, the result of Russia's massive invasion in Ukraine caused changes in the concept of security and disrupted the security stability of the Swedish state. This threat made Sweden take the decision to become a member of NATO (North Atlantic Treaty Organization) and end the 200 year policy of neutrality adopted by that country. Turkey, which is a member of NATO, refused to ratify Sweden's membership due to the *Partiya Karkeren Kurdistan* or PKK terrorism movement. sought refuge in Sweden.

In this research the author uses *Strategies and Tactics in Negotiation* in the form of a *Problem Solving* strategy to see the strategy or efforts made by Sweden towards Turkey to agree to Sweden's accession protocol in NATO. This research will answer Sweden's strategy in negotiating with Turkey in an effort to get Turkey to agree to Sweden's accession protocol to NATO in 2022-2023.

Keywords: *Sweden, Turkey, NATO, Negotiation strategies and tactics, Problem Solving*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2022 Swedia bersama dengan Finlandia mengajukan permohonan secara resmi untuk bisa bergabung ke dalam NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) yang dalam bahasa Indonesia berarti Pakta Pertahanan Atlantik Utara. NATO merupakan sebuah organisasi besar militer yang berskala Internasional yang memiliki tujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban diantara para anggotanya, pada awal pembentukannya NATO memiliki tujuan untuk menekan adanya pengaruh komunis yang dibawa Uni Soviet bersama aliansinya pada masa perang dingin. NATO didirikan pada 4 april 1949 yang ditandai dengan adanya penandatanganan Perjanjian Atlantik Utara. NATO terdiri dari 28 negara Eropa, 2 negara Amerika Utara, dan 1 negara Eurasia (Kays, 2022). NATO memiliki markas besar yang berlokasi di Brussel, dengan murni sebagai organisasi aliansi pertahanan dimana pada awal berdirinya NATO ini, mereka mewajibkan kepada seluruh negara anggota untuk mencari sebuah solusi yang bersifat damai dalam menyelesaikan sebuah konflik yang ada, dan dengan asas solidaritas dimana ketika ada satu negara anggota yang diserang oleh negara non-anggota maka negara anggota lainnya wajib membantu negara anggota NATO dalam menyelesaikan konfliknya (Abdi, 2022).

Tidak langsung terbentuk tanpa adanya alasan yang jelas, dimulai pada 4 Maret 1947 adanya Traktat Dunkirk sebagai *Treaty of Alliance and Mutual Assistance* yang ditandatangani oleh Inggris dan Prancis waspada akan serangan Uni Soviet atau Jerman pada perang dunia ke-II, dan pada tahun yang sama terjadi

perluasan aliansi ke negara-negara Benelux yang disebut dengan Organisasi Perjanjian Brussel (BTO) dalam bentuk Western Union, dan seiring berjalannya waktu setelah disahkannya NATO pada 1949 semakin banyak negara-negara yang masuk ke dalam organisasi ini tak terkecuali Swedia dan Finlandia yang mengajukan untuk menjadi anggota pada 2022 lalu, namun sempat terjadi penolakan oleh salah satu negara anggota NATO yaitu negara Turki. (CNN 2023)

Swedia dan Finlandia merupakan negara Nordik non-blok yang sudah sejak lama menjaga stabilitas militer di wilayah negara masing-masing, namun kondisi ini berubah semenjak adanya invasi besar-besaran yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina pada Februari tahun 2022 lalu, adanya invasi skala penuh yang dikomandoi oleh Vladimir Putin merusak stabilitas yang ada di wilayah kedua negara tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa Eropa Utara sedang dalam keadaan rentan pada saat ini, dengan bergabungnya kedua negara tersebut terhadap NATO maka akan ada jaminan keamanan sebagaimana termaktub dalam pasal 5 NATO yang memaknai bahwa serangan yang terjadi kepada salah satu negara anggota maka negara anggota lain harus ikut membantunya, hal ini membuat posisi kedua negara Eropa Utara tersebut lebih aman dari adanya serangan militer Rusia, namun di lain sisi adanya ketakutan yang terjadi pasalnya dengan bergabungnya Swedia dan Finlandia dapat menyebabkan ketegangan dari para negara-negara yang memiliki senjata Nuklir sehingga akan terjadinya perlombaan senjata dengan pihak Rusia, dilain sisi Swedia juga akan kehilangan perannya dalam menjadi negara yang netral, dimana pada tahun 1960-1980 an negara ini menjadi mediator internasional dalam upaya melucuti senjata nuklir global (Chatterjee, 2023).

Pada awalnya Turki sempat menolak untuk meratifikasi Swedia untuk menjadi anggota NATO sejak 2022 lalu, Turki berspekulasi bahwa Swedia mendukung dan menyembunyikan kelompok militan Kurdi PKK (*Partiya Karkeren Kurdistan*) yang melakukan gerakan separatisme pada tahun 2016 dan kabur ke Swedia untuk mencari perlindungan hal tersebut juga diperparah dengan adanya insiden pembakaran Al-Qur'an yang dilakukan oleh Rasmus Paludan di depan kantor kedutaan Turki di Stockholm tepat pada Januari lalu (DW, 2023). Tidak hanya sampai disitu pada saat hari Idul Adha di depan masjid pusat di Stockholm terjadi lagi aksi perobekan dan pembakaran Qur'an dari aksi unjuk rasa yang ada, menurut (Jefriando, 2023) aksi ini dihadiri oleh sekitar 200 orang yang berada di lokasi tersebut dan diperparah bahwa polisi memberikan izin terhadap unjuk rasa tersebut. Hal ini sangat menuai kontroversi dari berbagai negara tak hanya Turki itu sendiri, terlebih dalam insiden tersebut pemerintah Swedia dianggap angkat tangan dan tutup telinga, hal ini membuat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan marah terhadap pihak Swedia yang memberikan izin kepada kelompok PKK Kurdi yang dianggap sebagai teroris baik di Uni Eropa (UE), Amerika Serikat, dan Turki untuk melakukan aksi unjuk rasa. Di Lain sisi, terjadi demonstrasi yang terjadi di Turki itu sendiri, dimana sekitar dua ratus masyarakat Istanbul melakukan unjuk rasa di depan kantor kedutaan Swedia dengan mencoret foto Rasmus Paludan hingga ada yang melakukan aksi pembakaran bendera Swedia dan salib Nordik, unjuk rasa terjadi selama dua hari dengan mengancam kebijakan kebebasan berekspresi yang menjadi bagian dasar Demokrasi pada sistem pemerintahan Swedia. (Kurnia, 2023) Hal ini juga

berdampak terhadap kunjungan menteri pertahanan Swedia ke Turki yang dibatalkan melihat kepada kondisi yang masih panas tersebut.

Namun pada bulan Oktober 2023 Turki akhirnya menyetujui protokol aksesinya negara Swedia untuk bergabung dengan NATO, dalam hal ini Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memainkan perannya dengan sangat ideal, menggunakan kuasanya terhadap negara pendatang baru dalam NATO yang merupakan organisasi aliansi militer yang berdampak kepada tujuan nasional pada rezimnya, Erdogan mengambil keuntungan besar pada kondisi ini. Swedia, untuk mendapatkan restu dari Turki dalam bergabung NATO mengambil tindakan keras terhadap aktivitas gerakan Kurdi yang ada di negaranya, hal tersebut ditandai dengan adanya ekstradisi anggota Kurdi dari Swedia ke Turki (DW, 2023). Pada NATO sendiri juga menyetujui adanya pembentukan koordinator khusus terkait kontra terorisme, kebijakan ini sangat sejalan dengan kepentingan negara Turki dibawah rezim Erdogan dalam memberantas aktivitas PKK Kurdi yang dianggap sebagai kelompok terorisme di negara Turki, tidak sampai disitu AS juga mendukung masuknya Swedia ke NATO, karena negara ini memiliki produsen artileri, pesawat terbang, dan senjata tempur lainnya sehingga memperkuat posisi NATO di mata dunia. (Georgetown University, 2023). Dalam beberapa tuntutan yang Turki berikan terkait masuknya Swedia menjadi anggota NATO, Erdogan menyarankan maksud untuk membuka kembali jalan masuk negara Turki menjadi bagian dari Uni Eropa, pembicaraan ini telah dimulai sejak 2005 silam, namun sampai sekarang Turki masih belum mendapatkan penjelasan resmi mengenai hal tersebut setelah proposal mereka ditangguhkan pada tahun 2016 lalu, dimana terjadi kemunduran di negara Turki tentang hak demokrasi, hak asasi manusia,

dan juga adanya provokasi yang terjadi di masyarakat Turki pada masa pemerintahan presiden Recep Tayyip Erdogan. (DW, 2023)

Hal ini menjadi pembahasan yang menarik bagi peneliti dalam menganalisis strategi dan taktik negosiasi antara Swedia dan Turki dalam upaya menjadi anggota NATO (*North Atlantic Treaty Organization*). Turki menjadi pemeran penentu dalam meratifikasi keanggotaan Swedia, berbeda dengan negara Finlandia yang telah menjadi anggota resmi NATO pada april 2023 ini, Swedia memiliki tarik ulur hubungan yang sedikit hangat dengan negara Turki, namun pemerintah Swedia tidak tinggal diam dalam mencapai kepentingan negaranya, melalui strategi dan taktik negosiasi yang dilakukan Swedia, Turki yang awalnya menolak lambat laun memberikan lampu hijau bagi keanggotaan Swedia di NATO terlepas dari berbagai tuntutan yang diajukan oleh kedua belah pihak.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menganalisa suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimana Strategi Negosiasi Negara Swedia Terhadap Negara Turki dalam Meratifikasi Keanggotaan NATO tahun 2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada riset ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi negosiasi yang dilakukan negara Swedia kepada Turki dalam upaya meratifikasi keanggotaan Swedia di NATO.
2. Untuk mengetahui hasil kebijakan antara Turki-Swedia yang sesuai dengan kepentingan negara dalam upaya meratifikasi Swedia menjadi anggota NATO

3. Untuk mengetahui dinamika negara Swedia berupaya untuk bergabung menjadi anggota NATO

1.4 Cakupan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan batasan terhadap konflik yang diangkat, penulis berfokus kepada upaya negara Swedia yang ingin bergabung menjadi anggota NATO pada 18 Mei 2022 hingga diterimanya protokol aksesi keanggotaan Swedia di NATO pada 23 Oktober 2023.

Batasan waktu penelitian ini adalah pada masa pengajuan Swedia menjadi anggota NATO pada tahun 2022-2023 dimana terjadi pertemuan-pertemuan antara Swedia dan Turki yang saling bernegosiasi untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan yang terjadi.

Batasan tempat dari penelitian ini adalah negara Turki dan Swedia. Dimana Turki memainkan peran yang penting sebagai anggota NATO dalam meratifikasi upaya Swedia untuk bisa bergabung ke dalamnya dan mendapatkan keamanan.

Topik yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh negara Swedia terhadap Turki yang awalnya menolak untuk meratifikasi keanggotaan Swedia namun berubah setelah terlaksananya forum-forum negosiasi yang terjadi di antara kedua negara, hingga akhirnya Turki secara resmi menyetujui keanggotaan Swedia pada 23 Oktober 2023 ditandai dengan penandatanganan protokol aksesi Swedia di NATO oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (CNBC, 2023)

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian kali ini, peneliti menetapkan tiga sumber yang relevan sebagai referensi untuk diambil sebagai celah dalam melakukan penelitian. Paper pertama karya dari (Sari & Arifin, 2020, 10) dengan judul “Analisis Kudeta Militer Turki Tahun 2016”. Dijelaskan dalam jurnal tersebut tentang upaya penggulingan rezim Erdogan yang terjadi pada 15 Juli tahun 2016, walaupun kudeta tersebut dapat digagalkan oleh militer dan masyarakat Turki yang loyal terhadap Erdogan, namun pasca peristiwa tersebut Turki mengalami ketidakstabilan politik, sosial, dan budaya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adanya gerakan separatisme ini adalah faktor krisis sosial-domestik yang terjadi disana, ditandai dengan demonstrasi The Gezi Park Protests pada Maret-Agustus 2013, faktor berikutnya adalah perselisihan antara pemerintah Turki dengan suku Kurdi dimana puncak perselisihan tersebut ada di tahun 2015-2016, ditambah dengan konflik partai Erdogan AKP dengan Gulenist yang dikomandoi oleh Fethullah Gulen.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh (Yakti, 2016, 81) dengan judul “Kebutuhan Uni Eropa terhadap Institusi Keamanan: Peranan NATO di Era Kontemporer”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam realitanya Uni Eropa tidak memiliki kewenangan dan kapabilitas terhadap keamanan dan perdamaian negara anggotanya sendiri, sehingga perlu adanya campur tangan NATO dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Swedia merupakan negara anggota Uni Eropa, namun belum termasuk kepada anggota NATO, sehingga perlu adanya keikutsertaan dalam hal tersebut guna menjaga keutuhan dan keamanan negara. Uni Eropa (UE) dan NATO telah menyepakati sebuah perjanjian yang disebut

ESDP yang bertujuan untuk membangun benua Eropa yang maju dalam bidang ekonomi, dan sosial, dilain sisi juga aspek keamanan dan perdamaian yang harus dijaga secara bersama, inilah yang menjadi alasan mengapa perlu adanya NATO di Eropa walaupun Uni Eropa sudah terbentuk.

Jurnal yang ketiga karya dari (Lestari, 2023) dengan judul “Respon Turki Terhadap Aksesinya Finlandia dan Swedia dalam Keanggotaan NATO sebagai Taktik Negosiasi Konsesi dan Kompensasi”. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang bagaimana Turki merespons keinginan Swedia dan Finlandia menjadi anggota NATO, serta berbicara lebih lanjut mengenai tahapan-tahapan untuk menjadi anggota NATO. Penelitian ini terbatas kepada respon Turki terhadap aksesinya Finlandia dan Swedia dalam keanggotaan NATO hanya pada tahun 2022 saja, serta menjelaskan taktik kompensasi dan konsesi yang dilakukan oleh Turki terhadap kedua negara tersebut.

Dari penelitian terdahulu, peneliti ingin mengambil celah tentang negosiasi yang dilakukan oleh negara Swedia terhadap Turki dalam upaya meratifikasi keanggotaan NATO. Pada penelitian ketiga, penelitian terbatas hanya pada kurun waktu 2022 dan fokus terhadap respon Turki. Namun dalam penelitian ini fokus utama ada pada negara Swedia dengan analisis strategi yang dilihat dari awal Swedia memutuskan untuk bergabung dengan NATO pada 18 Mei 2022 hingga Turki akhirnya meratifikasi keanggotaan Swedia di NATO pada 23 Oktober 2023.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam memahami permasalahan yang terjadi diatas, perlu adanya kerangka berpikir yang mencakup teori serta konsep yang nantinya akan dijadikan

landasan dan panduan dalam melakukan sebuah penelitian, agar penelitian tersebut sesuai dengan prosedur ilmiah yang ada dan tersusun secara rapi dan sistematis. Penelitian ini menggunakan teori *Strategies and Tactics in Negotiation*, yang ditulis oleh (Carnevale & Pruitt, 1993) dengan judul buku *Negotiation in Social Conflict* dalam menjawab berbagai persoalan pada permasalahan yang telah peneliti jabarkan diatas.

Menurut (Carnevale & Pruitt, 1993) dalam menyelesaikan suatu konflik perlu adanya sebuah negosiasi dimana dalam sebuah negosiasi terdapat interaksi atau diskusi di antara dua belah pihak atau lebih dengan harapan untuk mencapai kesepakatan atau tujuan bersama. Menurut Pruitt, ada 5 strategi yang dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan sebuah konflik yaitu

Pertama, *Concession making*. Strategi konsesi dilakukan dengan pengurangan jumlah tuntutan dimana pihak yang memberi konsesi bisa dikatakan memberikan keuntungan kepada pihak lawan menuju kesepakatan bersama dalam negosiasi. Kedua, *Contending* yang merupakan sebuah strategi negosiasi yang bersifat bersaing. Strategi ini bersifat *win-lose solution* pihak satu menggunakan segala cara atau tidak mementingkan kepentingan pihak lainnya, dapat berupa dengan memberikan ancaman, gangguan, argumen persuasif, dan komitmen yang tidak dapat diubah. Ketiga, *Withdraw* atau mengundurkan diri. Keempat adalah *Inaction*. diam atau bertindak lamban.

Strategi terakhir yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini merupakan strategi *Problem Solving*, teknik ini merupakan upaya dari dua pihak atau lebih yang sedang bernegosiasi untuk menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* dengan adanya hal ini, besar harapan bagi kedua belah

pihak atau lebih dapat menemukan alternatif pemecahan secara bersama yang menguntungkan dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Strategi *Problem Solving* dalam penerapannya ada 3 bentuk untuk menghasilkan kesepakatan yang *win-win solution* yaitu *Expanding the pie*, *Exchanging Concessions*, dan *Solving Underlying Concern*.

Expanding The Pie merupakan bentuk strategi dengan cara memperluas pai. Pai disini memiliki artian sebagai sumber daya, maka penerapan strategi ini memiliki makna yaitu adanya peningkatan atau perluasan sumber daya yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang bernegosiasi dengan harapan adanya perluasan sumber daya yang terjadi dapat menyelesaikan masalah yang ada. Sebagai contoh suatu usaha laundry atau cuci baju mendapatkan pesanan yang banyak, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas produksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan oleh pemilik laundry tersebut dapat berupa meningkatkan jumlah pekerja atau membeli sebuah alat mesin cuci baru untuk menambah kinerja tersebut.

Exchanging Concessions merupakan salah satu bentuk dari strategi *Problem Solving* yang memiliki tujuan *win-win solution*. Bentuk ini digunakan dengan cara bertukar konsesi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi diantara pihak yang sedang berkonflik. Setiap pihak akan menghasilkan isu-isu permasalahan yang berbeda, dan perbedaan tersebut akan berpengaruh dalam skala prioritas penyelesaian masalah. Sebuah isu bisa dijadikan prioritas rendah bagi satu pihak sedangkan isu tersebut menjadi prioritas tinggi pada pihak yang lain.

Solving Underlying Concern merupakan bentuk dari strategi *Problem Solving* yang dilakukan dengan cara mencari titik temu atau dasar permasalahan yang ada dari masing-masing pihak, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat memberikan pemahaman baru dari dan masing-masing pihak dapat menentukan posisi serta mengambil jalan dalam sebuah keputusan. Masalah yang mendasar dapat diketahui dengan menanyakan secara langsung kepada pihak yang memiliki kekhawatiran, pada penerapan bentuk ini pihak ketiga juga memainkan peran dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. (Carnevale & Pruitt, 1993)

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan strategi *Problem Solving* dalam melihat konflik yang terjadi antara Turki dan Swedia. Konflik antara Turki dan Swedia sudah sejak lama terjadi, salah satu faktor adanya konflik ini ialah Turki yang menganggap Swedia mendukung dan melindungi PKK dan Suku Kurdi yang tinggal di sana, di lain sisi Turki, AS, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya menganggap bahwa kelompok tersebut merupakan bagian dari kelompok bersenjata teroris yang mengganggu kedaulatan masyarakat.

Momentum invasi Rusia ke Ukraina yang membahayakan Swedia sehingga beralih yang tadinya merupakan negara netral dan sekarang ingin bergabung dengan NATO, merupakan sebuah momen yang pas adanya ketika Turki melakukan negosiasi dengan Swedia untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, melalui teknik *Problem Solving* sebagai sebuah cara dalam bernegosiasi dengan pihak Swedia, adanya hubungan mutualisme yang saling membutuhkan satu sama lain sehingga dengan taktik ini besar harapan adanya penyelesaian konflik dengan baik.

1.7 Argumen Sementara

Dalam konteks analisis strategi negosiasi pemerintahan Swedia terhadap negara Turki dalam upaya meratifikasi keanggotaan NATO, kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti adalah teori *Strategies and Tactics in Negotiation*, yang ditulis oleh (Carnevale & Pruitt, 1993) dalam bukunya dengan judul *Negotiation in Social Conflict* dengan bentuk strategi *Problem Solving*. Dalam hal ini kedua negara sama-sama memiliki kepentingan nasional yang sangat penting. Turki merupakan negara yang memiliki hubungan buruk dengan etnis Kurdi dan partai PKK (*Partiya Karkeren Kurdistan*), dimana terjadi gerakan-gerakan separatisme yang diprakarsai oleh partai tersebut guna menjatuhkan rezim Erdogan yang sedang berjalan (Handayani, 2012, 12). Kegagalan gerakan separatisme pada tahun 2016 menyebabkan banyaknya militan Kurdi yang pergi ke negara lain salah satunya adalah Swedia, sehingga Turki memiliki hubungan yang kurang baik terhadap negara tersebut yang dianggapnya telah menyembunyikan dan membiayai kegiatan terorisme.

Dilain sisi, Swedia sedang terancam dalam keamanan negara disebabkan adanya invasi Rusia ke Ukraina yang semakin memanas mengharuskan adanya upaya lebih dalam menjaga ketahanan negara, hal ini membuat pemerintah berniat untuk bergabung menjadi anggota NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) sebagai aliansi dalam menjaga pertahanan negara yang berarti Swedia melakukan pergeseran identitas yang sebelumnya merupakan negara netral. Namun, dalam jalannya menjadi anggota NATO tidak semulus negara tetangganya yaitu Finlandia, dalam hal ini Turki selaku anggota NATO menolak untuk meratifikasi keanggotaan Swedia karena beberapa alasan, hal tersebut membuat Swedia

melakukan upaya-upaya negosiasi terhadap Turki agar meratifikasi keanggotaan negara Swedia di NATO.

Turki memang memainkan peran penting dalam proses keanggotaan Swedia di NATO. Namun pemerintah Swedia tidak tinggal diam untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di wilayahnya. Menerapkan strategi *Problem Solving* dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, Swedia melakukan negosiasi dan interaktif yang bersifat konstruktif terutama dalam penanganan tentang gerakan terorisme PKK yang mengkhawatirkan Turki. Adanya perluasan kerjasama serta penyelesaian masalah mendasar merupakan penerapan strategi *Problem Solving* yang dilakukan oleh Swedia dalam bentuk *Exchanging Concession, Expanding the Pie, dan Solving Underlying Concerns*.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada jenis penelitian kualitatif deskriptif yang dimana menggunakan metode studi pustaka pada subjek yang akan diteliti. Studi pustaka yang digunakan berkaitan dengan studi kasus yang akan diteliti, pada konteks kali ini yaitu tentang strategi dan taktik negosiasi negara Swedia terhadap Turki untuk meratifikasi keanggotaannya di NATO

Penelitian Kualitatif dari definisinya yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subjek penelitian seperti halnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara menyeluruh, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Hidayat, 2012). Dalam kajian pustaka yang dimulai, peneliti belum

menemukan adanya kajian yang serupa dengan bahasan untuk menganalisis kebijakan negara Turki yang pada awalnya menolak untuk meratifikasi Swedia untuk menjadi anggota NATO namun mendadak untuk menerimanya, serta alasan Swedia ingin menjadi anggota NATO.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi bahasan penelitian adalah Negara Swedia yang sedang mengalami krisis dalam menjaga stabilitas keamanan wilayahnya dikarenakan adanya invasi besar-besaran yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina sehingga Swedia mengambil keputusan untuk bergabung menjadi anggota NATO. Adapun upaya negosiasi yang dilakukan Swedia terhadap Turki yang menolak untuk meratifikasi keanggotaan Swedia di NATO merupakan objek dari penelitian ini.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan kajian-kajian tertulis yang ada di buku-buku, jurnal, dokumen, berita internasional, serta artikel yang ada di internet. Dari apa yang ditemukan tersebut perlu adanya korelasi yang sesuai dengan topik penelitian yang dibuat. Dengan teknik penulisan dari proses penelusuran pustaka, data yang diambil adalah data sekunder, dimana data ini diperoleh dari hasil penelusuran tulisan, buku, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Setelah mengumpulkan data yang sesuai dengan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan analisis sampai ke beberapa tahapan. Pertama, data-data yang ada dikaji lebih dalam sehingga ditemukan pokok

pembahasan dan kesimpulan yang ada, kemudian kesimpulan pada data tersebut dicatat dengan rapi dan terstruktur. Selanjutnya dari gagasan yang terstruktur tersebut dibagi menjadi sub-bab sesuai dengan waktu yang berurutan, dan dari setiap sub-bab yang ditulis lalu diberikan penjelasan yang detail menggunakan metode deskripsi. Di Tahap terakhir adalah menginterpretasi hasil dari semua temuan dan deskripsi yang telah dilakukan sehingga menjadi sebuah kesimpulan menyeluruh sebagai hasil dari penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis untuk menjelaskan secara singkat alur dalam penulisan skripsi. Dimulai dari bab pertama sampai bab terakhir penelitian, sehingga mampu menyederhanakan gambaran dari keseluruhan isi skripsi secara terstruktur, dalam hal ini peneliti membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:

Pada bagian pertama terdapat pendahuluan yang membahas diantaranya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian yang turunannya adalah jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan proses penelitian, lalu bagian pertama diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Pada bagian dua merupakan gambaran awal dari skripsi yang berisi tentang sejarah negara Swedia yang dahulu merupakan negara non-blok atau netral hingga akhirnya mengambil keputusan untuk masuk ke NATO . Dan pada bagian ketiga yaitu inti dari pembahasan yaitu tentang strategi dan taktik negosiasi negara Swedia terhadap Turki dalam upayanya untuk menjadi anggota NATO. Penelitian ini ditutup pada bab 4 yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB 2

UPAYA YANG DILAKUKAN NEGARA SWEDIA UNTUK BERGABUNG MENJADI ANGGOTA NATO

2.1. Pergeseran Sikap Netral Dalam Kebijakan Politik Luar Negeri Swedia

Swedia merupakan negara yang memiliki nilai histori yang panjang, negara ini merdeka pada tahun 1523 dibawah Gustav I Vasa setelah adanya pembubaran persatuan Kalmar. Pada abad ke-17 Swedia merupakan negara yang dikenal dengan kekuatan Eropa yang sangat kuat. Sebelum pada akhirnya pada tahun 1700 adanya penyerangan dari Rusia, Polandia, dan Denmark yang menghancurkan Swedia dan mengakhiri masa kejayaan negara kuat tersebut di Eropa. (Briney, 2019)

Pada perang Napoleon tepatnya pada tahun 1803 ketika Swedia mengalami kerugian yang cukup besar ditandai dengan jatuhnya sejumlah wilayah teritorial ke tangan Rusia (Olofsson, 2008). Kerugian ini merupakan titik awal negara Swedia mulai hilang sifat agresifnya, dan menjadi babak baru negara Swedia yang menjadi negara netral. Pada 1814, raja yang menduduki tahta Swedia kala itu Karl XIV Johan mendeklarasikan sifat kebijakan yang netral bagi negara Swedia. Semenjak saat itu Swedia tidak ikut campur dalam berbagai macam konflik dan sudah bertahan selama 200 tahun dengan tidak berpartisipasi dalam perang. Penerapan prinsip netral ini juga memiliki tujuan untuk menjaga otonomi negara Swedia dan juga kepentingan negara tersebut agar terbebas dari campur tangan negara lain atau pihak eksternal. (The Local Sweden, 2014)

Negara Swedia dengan interpretasinya yang fleksibel terhadap kebijakan netralitas telah berhasil menghindari konflik. Prinsip netral dalam kebijakan luar

negeri Swedia ini diaplikasikan tanpa mengkodifikasi netralitas tersebut ke dalam perjanjian internasional ataupun konstitusi, hal ini menimbulkan celah bagi perubahan terhadap kebijakan netral Swedia di kemudian hari. Pada saat Perang Dunia I, ketika Eropa terpecah menjadi beberapa kekuatan besar. Swedia menjadi wilayah yang kurang perhatian bagi aktor lain, negara ini mendeklarasikan netralitas dirinya ketika perang yang pecah pada musim panas 1914, dan setelah berakhirnya Perang Dunia I, Swedia berada dalam kondisi keamanan yang lebih baik, dimana terbentuknya Uni Soviet, negara tetangga Finlandia yang baru merdeka, serta munculnya tiga negara kecil baltik baru di wilayahnya. (Brommesson et al., 2022)

Pada Perang Dunia II. Swedia masih bertahan dengan kebijakan netralnya dan dipandang hal tersebut merupakan satu-satunya pilihan oleh Perdana Menteri Swedia saat itu Per Albin Hansson. Namun dilain sisi terjadi pro-kontra terhadap kebijakan ini, karena Swedia alih-alih menerapkan kebijakan netral namun secara tidak langsung masih terlibat pada pecahnya Perang Dunia II. Swedia mempersenjatai Finlandia yang kala itu diserang oleh Uni Soviet pada perang musim dingin 1934. Pada 1940 pemerintah Swedia mengizinkan adanya transit pasukan Nazi dari Norwegia untuk pergi ke Finlandia. Swedia pada kala itu memiliki kedekatan dengan Nazi, adanya bisnis antara kedua negara dimana Swedia mengekspor bijih besi yang merupakan bahan dasar pembuatan senjata, di lain sisi Nazi yang mengekspor batu bara kepada negara Swedia, ditambah adanya pendampingan konvoi kapal Nazi di perairan Baltik bersama Angkatan Laut Swedia. Unikny tak hanya membantu Nazi, Swedia juga ikut serta berpartisipasi dalam membantu sekutu, salah satu contohnya adalah memberikan izin dalam

penggunaan pangkalan militer oleh pesawat sekutu dan juga ikut serta dalam membantu intelijen para sekutu. Swedia juga menjadi aktor yang memiliki andil besar dalam menyelamatkan pengungsi Yahudi pada Perang Dunia II. Hal ini yang menjadi pro-kontra terhadap kebijakan Swedia yang dianggap netral. (Kinasih, 2022)

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan dan meningkatkan keamanan negaranya dalam menghadapi gelombang api Uni Soviet kala itu, Swedia berupaya untuk membangun Uni Pertahanan Nordik bersama negara-negara tetangganya yaitu Norwegia dan Denmark. Adanya upaya negosiasi yang insentif berlangsung selama tahun 1948 dan diakhiri pada 1949 setelah upaya ini gagal, kegagalan ini membuat Denmark dan Norwegia bermanuver menjadi anggota pendiri NATO sementara Swedia masih bertahan dengan konsep non-blok negaranya. Terlepas dari hal tersebut pada Perang Dingin, Swedia banyak berinvestasi dalam bidang pertahanan negaranya, hal ini terbukti dengan angkatan udara Swedia yang menempati urutan empat besar di dunia. Pada 1946 Swedia bergabung dengan PBB dimana Swedia melihat bahwa dengan menjadi anggota PBB hal tersebut sesuai dengan kebijakan netralitas yang ada pada badan negara Swedia, walau ada perdebatan yang berasal dari Menteri Luar Negeri Swedia saat itu Osten Unden yang menyatakan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam kebijakan untuk menjadi anggota PBB, PBB dalam praktiknya memiliki kewenangan penuh untuk memaksa negara anggotanya untuk menjalani segala keputusan yang telah ditetapkan. (Orange, 2022)

Para politisi Swedia berpandangan pada pertengahan tahun 1950-an bahwa dengan adanya penerapan kebijakan netralitas perlu diimbangi dengan sikap yang

pasif dalam melihat kebijakan luar negeri, hal tersebut dikarenakan dua alasan. *Yang pertama* adalah para pembuat kebijakan dan keputusan di Swedia merasakan gelombang konflik yang semakin memanas antara blok Timur dan Barat, Swedia harus berupaya untuk menghindari hal tersebut guna menjaga stabilitas negara yang terjadi karena perpecahan dua blok ideologi dan militer yaitu Pakta Warsawa dan NATO. Swedia sebagai negara netral yang kecil harus bisa bersabar dan tidak menyebabkan amarah di antara dua kubu tersebut. *Kedua*, oleh karena hal tersebut Swedia tidak boleh secara terang-terangan dan jelas menyuarakan pandangannya mengenai isu-isu sensitif pada dunia internasional, hal ini akan berakibat kepada rusaknya identitas negara Swedia sebagai negara yang netral dan tidak berpihak pada blok manapun.

Dengan adanya kebijakan tersebut, membuat posisi Swedia menarik dalam kacamata Internasional. Di bawah generasi baru Partai Sosial Demokrat yang pada saat itu memimpin Swedia pada 1950-1960-an. kebijakan netral membuat Swedia tidak memihak kepada konflik manapun. Menurut Olof Palme yang merupakan ketua dari Partai Sosial Demokrat hal ini memungkinkan Swedia untuk terlibat dengan memberikan kritik terhadap negara-negara besar yang sedang mengalami konflik dan di sisi lain memberikan dukungan terhadap negara-negara lemah atau berkembang, hal ini membuat Swedia menjadi aktor internasional yang berupaya memiliki pengaruh dalam penyelesaian konflik yang terjadi di luar negaranya sendiri. (Brommesson et al., 2022)

Swedia yang memposisikan diri menjadi penengah dalam masa Perang Dingin antara tahun 1945 dan 1990 menduduki peringkat ke-2 setelah Kanada karena kontribusinya dalam pemeliharaan perdamaian dunia, salah satu peristiwa

yang terjadi ada pada tahun 1968 dimana ketika Olof Palme yang merupakan Perdana Menteri Swedia kala itu ikut serta melakukan demonstrasi bersama Duta Besar Vietnam Utara untuk Moskow dan menjadi negara eropa pertama yang mengakui kedaulatan pemerintahan Vietnam Utara, hal ini menjadikan kebijakan luar negeri Swedia yang Independen serta memperluas wilayah diplomatiknya keluar dari Eropa, terlepas pada 1976 Partai Solidaritas Demokrat mengalami kemunduran dan kehilangan kekuasaan, pemerintahan negara Swedia masih berpegang teguh terhadap prinsip non-blok dan netral. (Britannica, 2023)

2.1.1 Hubungan negara Swedia dengan Rusia pasca Perang Dingin

Negara Swedia dan Rusia memiliki sejarah yang sangat panjang, berbicara mengenai hubungan kedua negara tersebut. Dimulai pada abad ke-17 dan ke-18 adanya upaya penaklukan Finlandia yang dahulu masih dalam daerah kerajaan Swedia oleh tsar Kekaisaran Rusia, dilanjutkan dengan kalahnya Swedia dalam pertempuran di Poltava (sekarang Ukraina) menandakan berakhirnya kekuatan besar Swedia di Eropa kala itu, dan pada 1809 karena Rusia, Swedia harus rela kehilangan Finlandia yang menjadi bagian otonom dari kekaisaran Rusia. (Kauranen & Ahlander, 2022)

Setelah berakhirnya Perang Dingin pada 1993 adanya deklarasi kerjasama dalam hal politik dan ekonomi antara Swedia yang diwakili oleh Perdana menteri Carl Bildt dengan Presiden Rusia Boris Yeltsin, dengan pandangan bahwa Rusia dan negara pecahan Uni Soviet yang sudah tidak dikuasai oleh komunisme dan imperialisme dapat menuju kondisi negara yang lebih baik dan mengurangi ancaman keamanan Eropa dan berdampak pada keamanan baik secara regional maupun Internasional. Pada tahun 2000 adanya peningkatan dalam hubungan

antara negara barat dengan Rusia, hal ini terjadi ketika naiknya Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia dan arah kebijakan politik luar negerinya yang pro terhadap negara Uni Eropa, hal ini ditandai dengan upaya Rusia dalam mengikuti berbagai organisasi, salah satunya ambisi Rusia untuk bisa bergabung di WTO (*World Trade Organization*) (Putra, 2018, 14).

Meletusnya perang Georgia pada 2008 dan Perang Chechnya pada 1994 menjadi awal dari menurunnya hubungan antara Negara Swedia dengan Rusia, terutama bagi negara-negara yang menjalankan kebijakan negara yang demokratis dan menjaga hak asasi manusia, sedangkan apa yang dilakukan Rusia sangat bertentangan dengan kedua hal tersebut. Swedia beranggapan bahwa Negara Rusia masih belum bisa sepenuhnya mengikhlaskan negara bekas Uni Soviet yang bukan dalam wilayah teritorinya, dan berhak untuk melakukan tindakan apapun bagi negara kecil yang ingin bergabung atau mendekat ke Uni Eropa ataupun NATO. Hal ini membuat Swedia semakin intens dalam meningkatkan kerjasama kolektif dan hubungan dengan NATO melalui PFP (*Partnership of Peace*) yang dibentuk untuk menjaga keamanan negara di wilayah Eropa (Lidqvist, 2016, 35)

Hubungan antara Negara Swedia dan Rusia semakin memanas pasca gencarnya agresi yang dilakukan oleh Rusia terhadap negara-negara tetangga, hal ini membuat kekhawatiran yang serius bagi keamanan negara yang mulai terancam. Memanasnya konflik yang ada di Ukraina membuat Riksdag yang merupakan lembaga legislatif dan juga badan pengambil keputusan terbesar di Swedia melakukan observasi dan menghasilkan 3 pandangan terhadap Rusia, *Yang pertama*, Rusia dengan kekuatan militer yang kuat tidak ragu untuk melakukan intervensi atau mengerahkan pasukan militer kepada negara tetangga.

Kedua, melihat kepada sikap dan aksi agresif yang dilakukan Rusia selama ini, adanya ketidaktentuan terkait kebijakan Rusia di masa yang akan datang. *Ketiga*, dampak dari kedua observasi tersebut mengharuskan Swedia untuk meningkatkan kerjasama dalam Uni Eropa untuk menyelesaikan krisis yang terjadi terutama yang terjadi pada Ukraina, oleh karena itu Swedia akhirnya mengambil keputusan untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di wilayahnya.

Pada wawancara yang terjadi pada akhir tahun 2015, diadakan diskusi terbuka yang dihadiri oleh Dewan Urusan Internasional atau *Russian International Affairs Council* di Moskow, adanya penggambaran hubungan antara Swedia dengan Rusia yang rumit, walaupun dalam sektor perdagangan masih berjalan hubungan yang baik antara keduanya. Geopolitik global menjadi faktor utama dalam melihat kondisi hubungan yang memiliki sejarah panjang ini. Dalam diskusi tersebut Rusia memandang Swedia sebagai negara periferal, namun berbeda dengan Rusia, Swedia memandang negara yang dipimpin Putin ini sebagai ancaman eksistensial. Kekhawatiran tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai kedekatan Swedia dengan NATO, apakah pada akhirnya Swedia akan bergabung, dan mengubah kebijakan luar negerinya secara radikal menjadi negara yang berpihak terhadap suatu kubu, hal ini juga berdampak terhadap Rusia yang akan mengambil sikap apabila hal tersebut terjadi. (Simons et al., 2019)

2.1.2 Hubungan yang terjalin antara negara Swedia dengan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*)

Perang dingin yang terjadi pada 1947 dan berakhir pada 1991 ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet menimbulkan perubahan pola konsep keamanan global, dan hal ini berdampak juga terhadap kebijakan politik luar negeri Swedia dimana pandangan tentang ancaman tidak lagi merujuk kepada konflik militer antar negara, perebutan wilayah, atau pemasukan ideologi pada negara tertentu. Konflik yang ada semakin meluas dan muncul isu-isu baru yang terjadi antara aktor-aktor Internasional seperti isu lingkungan, terorisme, ekonomi dan isu lainnya yang mengganggu stabilitas negara. Sehingga adanya pergeseran dalam prioritas konflik yang tidak lagi tentang militer seperti ketika Perang Dingin dan Perang Dunia yang lalu. (Lidqvist, 2016, 22)

Pada 1 Januari 1995, Negara Swedia secara resmi menjadi anggota Uni Eropa, masuknya Swedia ke UE memiliki tujuan untuk meningkatkan aspek-aspek dalam menunjang stabilitas negaranya seperti keamanan ekonomi, dan politik. Swedia tetap mempertahankan kebijakan netralnya dalam aspek militer dengan hanya diterapkan untuk menjaga perdamaian internasional dan operasi-operasi kemanusiaan. Dalam CFSP atau *Common Foreign and Security Policy*, meningkatnya pengaruh dalam kebijakan keamanan dan pertahanan yang ada di wilayah eropa yang dijalankan negara netral lain menjadi prioritas utama negara Swedia (TEPE, 2007, 193)

Masuknya Swedia ke dalam Uni Eropa juga berdampak kepada kedekatannya dengan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) melalui program PfP (*Partnership for Peace*) hal ini sejalan dengan kebijakan netral

negara Swedia. Kerjasama antara Swedia dengan NATO melalui PfP merupakan langkah awal dimulainya kedekatan antara Swedia dengan NATO, adapun kerjasama lebih lanjut yang terjadi antara Swedia dengan NATO meliputi:

1. Sejak tahun 1990-an adanya peningkatan kerjasama antara Swedia dengan NATO dalam tujuan untuk bersama sama menyelesaikan situasi krisis yang terjadi. Swedia berpartisipasi ke dalam operasi di bawah NATO yang berlokasi di Kosovo, Afghanistan, Libya, Bosnia, Herzegovina dan Irak. Swedia juga menjadi tuan rumah dalam latihan gabungan militer NATO dan meningkatkan kapabilitas militernya dalam standarisasi dan pengembangan kemampuan.
2. Adanya pengangkatan Duta Besar Negara Swedia untuk NATO pada tahun 1998.
3. Pada tahun 2008 Swedia sudah memiliki delegasi negaranya sendiri di markas besar NATO yang berlokasi di Brussel yang dipimpin oleh Duta Besar Swedia untuk NATO, dan sejak tahun 2013 Swedia juga turut serta berpartisipasi dalam pelatihan paling canggih yang berada di NATO.
4. Pada tahun 2014 Swedia menjalin kemitraan yang disesuaikan dengan kebijakan NATO bersama dengan Finlandia, dengan status *Enhanced Opportunities Partner* (EOP) yang merupakan bentuk kerjasama yang dirancang dengan fokus utama pada dialog politik, pertukaran informasi, dan pelatihan militer.
5. Adanya penandatanganan Perjanjian Dukungan Negara Tuan Rumah yang dilakukan oleh Swedia pada tahun 2016. Perjanjian ini dapat menjadikan Swedia sebagai negara yang dapat memberikan atau mendapat dukungan

dari NATO apabila terjadi perang. Bentuk dari dukungan ini dapat berupa militer dan sipil serta pengaturan praktis dan logistik.

Invasi besar-besaran yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, membuat Swedia mengambil keputusan untuk meningkatkan kerjasama dengan NATO. hal tersebut membuat Swedia mengambil keputusan untuk menjadi anggota dari Pakta Pertahanan tersebut. Pada 18 Mei 2022 Swedia akhirnya mengajukan permohonan untuk menjadi anggota NATO (“History of Sweden and NATO” 2023)

2.2. Kebijakan Negara Swedia Untuk Bergabung Dengan NATO

Setelah 30 tahun adanya hubungan keamanan yang terjalin antara NATO dan Swedia, tercatat pada 18 Mei 2022 Swedia mengakhiri masa 200 tahun kebijakan luar negeri yang bersifat netral dan mengajukan diri untuk menjadi anggota NATO dengan menandatangani aplikasi keanggotaan yang dilakukan oleh Ann Linde Menteri Luar Negeri Swedia bersama negara tetangganya Finlandia. Hal ini didasari dari aksi Rusia yang melakukan invasi secara penuh terhadap Ukraina pada Februari 2022. (NATO, 2023)

Dalam beberapa tahun terakhir, Swedia merasa terancam oleh berbagai perilaku agresif dari Rusia seperti adanya pelanggaran wilayah udara yang dilakukan militer Rusia, kapal selam Rusia yang bersembunyi di perairan dangkal yang terletak pada kepulauan Stockholm dan penguatan militer dalam menjaga pulau Gotland milik Swedia. (Chatterjee 2022)

Bergabungnya Swedia menjadi anggota NATO akan memberikan jaminan keamanan bagi negara tersebut, terutama dari negara-negara yang memiliki

senjata nuklir. Namun Vladimir Putin selaku Presiden Rusia melihat bahwa adanya ekspansi NATO merupakan sebuah ancaman bagi Rusia. Masuknya Swedia dan Finlandia menjadi anggota NATO akan mendorong Rusia untuk mengerahkan senjata nuklir dan ancaman yang lebih nyata seperti kampanye disinformasi, pelanggaran wilayah udara serta serangan siber. (Chatterjee 2022)

Keputusan yang diambil Swedia untuk bergabung dengan NATO menuai banyak opini, salah satunya berasal dari Deborah Solomon yang merupakan seorang jurnalis, ia berargumen bahwa dengan masuknya Swedia akan meningkatkan ketegangan dalam masalah nuklir dan perlombaan senjata dengan Rusia sehingga mempersulit upaya damai yang terjadi, di lain sisi dengan bergabungnya Swedia ke dalam NATO membuat negara tersebut akan kehilangan peran sebagai pemimpin dalam upaya melucuti senjata nuklir global. Keputusan bergabungnya Swedia terhadap NATO akan mengubur semua mimpi tersebut (Chatterjee 2022)

2.2.1 Hubungan Bilateral dan Respon Turki dalam Melihat Keanggotaan Swedia di NATO

Hubungan kedua negara antara Turki dengan Swedia dalam aspek politik sudah dimulai sejak abad ke-17. Kekalahan Raja Swedia, Karl XII saat melawan Rusia pada tahun 1709 membuatnya harus berlindung di bawah kekaisaran Ottoman. Hubungan antara Swedia dan Turki berlanjut ditandai dengan adanya penandatanganan perjanjian dagang, aliansi perdamaian, persatuan, dan persahabatan antara kedua negara yang disepakati pada tahun 1737 dan 1739, antara Kerajaan Swedia dengan Kekaisaran Ottoman. Pada 1924 adanya perjanjian persahabatan yang ditandatangani serta perkembangan hubungan

bilateral yang ditandai dengan adanya “Deklarasi Kemitraan Strategi” antara Turki dan Swedia pada tahun 2013. (“Relations between Türkiye and Sweden / Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs”, n.d.)

Pada aspek ekonomi adanya pembentukan *Joint Economic and Trade Committee* (JETCO) antara Turki dan Swedia pada 10 Agustus 2014 dan telah mengadakan pertemuan perdana pada 5 Mei 2021. Hubungan kerjasama ekonomi antara Turki dan Swedia semakin membaik ditandai dengan meningkatnya volume ekspor-impor antara kedua negara tersebut pada setiap tahunnya. Turki mengekspor barang-barang seperti garmen, mesin listrik, mobil, suku cadang otomotif, kabel dan lain sebagainya, dilain sisi Swedia mengirimkan reaktor nuklir, bijih besi, bahan bakar mineral, besi dan baja kepada Turki. Tercatat selama tahun 2020-2022 investasi Swedia kepada Turki mencapai 426 juta dolar, sebaliknya investasi Turki kepada Swedia mencapai 239 juta dolar. Dalam aspek wisatawan mancanegara, sebanyak 444 ribu wisatawan asal Swedia mengunjungi Turki pada tahun 2019 walau terjadi penurunan pada tahun setelahnya karena faktor pandemi, namun pada 2022 terjadi kenaikan kembali mencapai 415 ribu wisatawan.

Dalam sektor budaya dan pendidikan, pada Departemen Bahasa dan Filologi Universitas Uppsala yang terletak di Swedia terdapat unit Turkology disana dan juga berdirinya Institut Studi Turki di Universitas Stockholm pada Oktober 2012 yang baru secara resmi dibuka pada Maret 2013. Adapun pertukaran pelajar yang terjalin di antara kedua negara ini. Sebanyak 1.865 pelajar Turki datang ke Swedia dan kurang lebih 398 pelajar Swedia berangkat ke Turki untuk menempuh Studi pada tahun 2014-2022. Sebanyak 70 ribu warga Turki

hidup dan tinggal di Swedia, Turki juga memiliki konsulat kehormatan yang terletak di Malmö, dilain sisi Swedia juga memiliki konsulat tersebut yang berada di Alanya, Mersin, Antalya, dan Izmir. (“Relations between Türkiye and Sweden / Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs”, n.d.)

Swedia dan Turki memiliki hubungan bilateral yang dapat dikatakan baik, melihat kepada aspek-aspek yang ada yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sudah terjalin, Turki dan Swedia sudah menjalin hubungan bilateral pada masa abad ke-17 dan masih terhubung hingga saat ini, namun hal ini berbanding terbalik jika melihat kepada respon Turki tentang protokol akses Swedia untuk menjadi anggota NATO.

Turki merupakan anggota NATO sejak tahun 1952, negara tersebut mendukung kebijakan *Open Door Policy* NATO dalam menerima anggota baru di aliansi tersebut, namun sikap hangat Turki berbeda ketika Swedia dan Finlandia ingin bergabung dengan NATO. Recep Tayyip Erdogan selaku Presiden Turki menolak dengan keras masuknya kedua negara tersebut dikarenakan Erdogan menganggap bahwa Swedia merupakan rumah dari gerakan terorisme *Partiya Karkeren Kurdistan* atau PKK dan juga Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah atau YPG yang telah melakukan gerakan separatisme di Turki pada tahun 2016 dan melarikan diri ke Swedia untuk mencari perlindungan. Swedia dan Finlandia juga melakukan embargo senjata terhadap Turki pada tahun 2019 setelah adanya aksi penyerangan gerakan teroris YPG yang dilakukan Turki di Suriah Utara. Menurut Sinan Ulgen seorang mantan diplomat Turki menyatakan bahwa ada kekhawatiran yang nyata dan harus dibahas sebelum masuknya kedua negara Nordik ke NATO, terlebih adanya penolakan ekstradisi 21 orang yang diduga teroris oleh Swedia

dan tuntutan lainnya yang belum ditangani selama bertahun-tahun. Hal inilah yang menyebabkan Turki menolak kedua negara tersebut untuk menjadi anggota NATO. (BBC 2022)

Turki memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Swedia dalam aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya hal tersebut sudah berjalan pada masa abad ke-17. Namun berbanding terbalik dengan hubungan antara Turki dan Swedia dalam aspek keamanan atau militer. Turki menolak untuk meratifikasi keanggotaan Swedia di NATO dengan berbagai alasan kekhawatiran yang nyata, melihat kepada apa yang telah Swedia lakukan selama ini, Turki memberikan sikap tegas terhadap keputusan negara Swedia untuk bergabung dengan NATO.

2.3. Dinamika Perjalanan dan Upaya Negosiasi Swedia Terhadap Turki Untuk Bergabung Menjadi Anggota NATO.

Turki memainkan peran yang penting dalam keanggotaan Swedia di NATO. Erdogan memanfaatkan momentum tersebut untuk menyuarakan tentang keresahan yang dialami selama ini yaitu terkait gerakan terorisme PKK Kurdi yang mencari perlindungan di Swedia dan juga embargo senjata yang Swedia lakukan pasca penyerangan Turki kepada kelompok teroris YPG di Suriah (BBC 2022). Namun dalam melihat kondisi ini, pemerintah Swedia berupaya untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi guna menyelesaikan masalah keamanan yang ada di negara tersebut. Swedia melaksanakan forum-forum negosiasi dan interaksi konstruktif bersama Turki dalam menyelesaikan permasalahan secara bersama, adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Swedia pada tahun 2022-2023 menghasilkan buah manis dengan disetujuinya protokol

aksesi Swedia oleh Turki pada Oktober 2023.

2.3.1 Upaya Swedia Terhadap Turki Dalam Meratifikasi Keanggotaan di NATO Tahun 2022

Pada awal tahun 2022 tepatnya pada 24 Februari, Rusia melakukan invasi besar-besaran terhadap Ukraina. Hal ini membuat negara tetangga seperti Swedia dan Finlandia merasa terancam. Sehari setelah kejadian tersebut, kedua negara memperkuat kerjasama dan komunikasi strategis dengan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) yang disebut dengan MSI atau *Modalities for Strengthened Interaction*. Kondisi internal Swedia mulai mengarahkan fokus terhadap keamanan negaranya, pada bulan maret tanggal 16 pemerintah mengadakan diskusi dengan Riksdag selaku lembaga legislatif nasional dan badan pengambil keputusan tertinggi di Swedia membahas tentang perubahan konsep keamanan akibat invasi Rusia di Ukraina.

Setelah diterimanya laporan hasil dan kesimpulan diskusi. Pemerintah Swedia memutuskan untuk mengajukan keanggotaan pada NATO yang didasari dari kajian-kajian atau forum diskusi. Pada 18 Mei 2022 Swedia mengajukan permohonan keanggotaan NATO yang ditandatangani oleh Ann Linde selaku Menteri Luar Negeri Swedia yang diberikan kepada Jens Stoltenberg selaku Sekretaris Jenderal NATO oleh Duta Besar Swedia untuk NATO Axl Werlhoff bersamaan dengan Finlandia. Turki yang mengetahui hal tersebut secara tegas menolak proposal keanggotaan negara Swedia dan Finlandia karena masalah gerakan terorisme PKK. (.government.se, 2023)

Pada 28 Juni 2022, sehari sebelum terlaksananya KTT NATO di Madrid, dibawah Jens Stoltenberg selaku Sekretaris Jenderal NATO. Dalam upaya untuk

mengatasi kekhawatiran Turki terhadap Swedia dan Finlandia yang mendukung gerakan Kurdi di negaranya. Adanya penandatanganan memorandum trilateral yang terjadi, dihadiri oleh Magdalena Andersson Perdana Menteri Swedia, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Finlandia Sauli Niinistö (NATO, 2022). Adanya memorandum ini membuka jalan Swedia dan Finlandia semakin lebar untuk menjadi anggota NATO, adapun hasil dari kesepakatan tersebut adalah

1. Negara Finlandia dan Swedia berkomitmen untuk tidak memberikan dukungan kepada organisasi teroris yang digambarkan negara Turki, kepada YPG/PYD, dilain sisi Turki memberikan dukungan juga kepada Swedia dan Finlandia terhadap masalah keamanan nasional yang terjadi. Swedia dan Finlandia berjanji untuk mengutuk seluruh gerakan dan tindakan terorisme yang terjadi terhadap negara Turki dan menyampaikan solidaritasnya terhadap Turki dan korban terorisme.
2. Swedia dan Finlandia secara resmi mengumumkan bahwa PKK merupakan organisasi teroris. Swedia dan Finlandia sepakat untuk bekerjasama dengan Turki untuk memberantas organisasi teroris dan kelompok atau jaringan yang berafiliasi dengan kelompok teroris
3. Swedia mempersiapkan lebih mendalam tentang undang-undang kontra-terorisme yang ada di negaranya dan juga undang-undang pelanggaran teroris yang dibuat lebih baru mengacu kepada kondisi terbaru yang akan diimplementasikan pada 1 juli mendatang.
4. Swedia, Finlandia, dan Turki sepakat tidak ada lagi embargo senjata nasional di antara ketiga negara tersebut, ditambah dengan Swedia yang

memodifikasi peraturan nasional tentang ekspor senjata dengan sekutu NATO.

5. Ketiga negara setuju untuk berkomitmen dalam langkah-langkah kedepan yang konkrit yaitu
 - a. Membentuk adanya sebuah mekanisme dialog dan sistem kerjasama yang rapi dan terstruktur pada seluruh tingkat pemerintahan yang didalamnya terdapat berbagai elemen pemerintah seperti penegak hukum dan badan intelejen dalam tujuan untuk menegakkan sikap yang kontra terorisme
 - b. Swedia dan Finlandia mengambil langkah serius dalam melawan terorisme dengan melakukan perang dan tekad sesuai dengan ketentuan dan kebijakan NATO serta memperkuat undang-undang nasional.
 - c. Swedia dan Finlandia akan melakukan ekstradisi terhadap dugaan tersangka teror oleh Turki dengan cepat yang didukung oleh pertimbangan dari berbagai elemen dan menerapkan hukum bilateral, mengacu kepada konvensi Eropa tentang ekstradisi.
 - d. Swedia dan Finlandia akan melakukan penyelidikan terhadap segala kegiatan pendanaan dan kaderisasi PKK atau organisasi teroris lainnya.
 - e. Swedia, Finlandia, dan Turki akan berupaya untuk mencegah adanya disinformasi yang terjadi serta penyalahan undang-undang domestik demi kepentingan organisasi teroris

- f. Kedua negara baltik, Swedia dan Finlandia akan berkomitmen secara penuh dalam memastikan kerangka peraturan nasional terkait ekspor senjata sebagaimana komitmen mereka untuk menjadi anggota baru NATO.
6. Pembentukan mekanisme secara bersama yang bersifat permanen, terbuka bagi siapapun yang tergabung dan dengan partisipasi oleh para ahli baik dalam bidang intelijen, keamanan hingga kementerian luar negeri.
7. Turki secara tegas mendukung adanya kebijakan pintu terbuka atau *Open door policy* NATO dan setuju untuk mengundang Swedia dan Finlandia untuk mengikuti KTT Madrid 2022 (Donmez, 2022).

Setelah memorandum trilateral dilaksanakan, ketiga negara mengadakan pertemuan-pertemuan secara rutin untuk membahas kemajuan dan progress dari memorandum trilateral. Pertemuan diadakan pada

1. Pertemuan memorandum pertama terjadi pada 26 Agustus 2022 di Vantaa, Finlandia
2. Pertemuan memorandum kedua terlaksana pada 25 November 2022 di Stockholm, Swedia
3. Pertemuan memorandum ketiga dilaksanakan pada 9 Maret 2023 di Brussels, Belgium
4. Pertemuan keempat memorandum trilateral dilaksanakan pada 14 Juni 2023 di Ankara, Turki
5. Pertemuan kelima memorandum trilateral dilaksanakan pada 6 Juli 2023 di Brussels, Belgium

Sehari setelahnya KTT NATO di Madrid dilaksanakan dengan Swedia dan Finlandia menjadi negara tamu pada forum tersebut. KTT NATO di Madrid dilaksanakan pada 29-30 Juni 2022.

Pada awal bulan Juli 2022, Swedia mengambil bagian untuk menyelesaikan pembicaraan aksesinya di markas besar NATO di Brussels, Swedia secara resmi akan memenuhi kewajiban, hukum, komitmen, dan militer untuk menjadi anggota NATO yang dilaksanakan pada Senin 4 Juli. Setelah pembicaraan aksesinya di Markas besar NATO, tahap selanjutnya adalah penandatanganan protokol aksesinya keanggotaannya di NATO oleh negara-negara anggota yang terjadi selama 5 Juli sampai 27 September 2022, dimana didapatkan hasil terdapat 28 negara anggota menyetujui keanggotaannya di NATO, hanya Turki dan Hongaria yang belum meratifikasi protokol aksesinya tersebut. (NATO, 2022)

Pada awal bulan Oktober Swedia menyebarluaskan memorandum keanggotaannya NATO untuk mendapat umpan balik dan komentar dari para pemangku kepentingan dan juga seluruh masyarakat Swedia guna menyuarakan kebebasan berpendapat dan juga bertukar pandangan. dilanjut pada bulan yang sama tanggal 26 pemerintah negara Swedia membentuk tim penyelidikan tentang masalah hukum untuk NATO yang akan memberikan laporan pada Desember akhir 2023.

Menuju akhir tahun 2022 Swedia melakukan ekstradisi anggota PKK (*Partiya Karkeren Kurdistan*) ke Turki pada Jumat, 2 Desember lalu. Mahmut Tat tersangka anggota PKK yang melarikan diri ke Swedia pada tahun 2015. Hal ini sebagai upaya Swedia untuk memenuhi memorandum trilateral yang telah dibuat

dengan Turki dan Finlandia. Turki mendesak Swedia untuk melakukan ekstradisi sebagai pemenuhan kewajiban atas memorandum trilateral tersebut. (Pakar, 2022)

2.3.2 Upaya Swedia Terhadap Turki Dalam Meratifikasi Keanggotaan di NATO Tahun 2023

Mengawali awal tahun 2023, terjadi demonstrasi besar-besaran di Swedia. Pada 21 Januari 2023 lalu terjadi aksi demonstrasi terhadap Turki dan penolakan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Para demonstran melakukan unjuk rasa dengan memegang spanduk besar berwarna merah yang bertuliskan ‘Kita Semua PKK’, hal ini menandakan adanya protes terhadap Turki dan perjanjiannya dengan Swedia untuk tidak mendukung adanya organisasi teroris salah satunya adalah PKK. Demonstrasi mencapai puncaknya ketika salah satu demonstran yang juga merupakan politisi sayap kanan Denmark, Rasmus Palu Dan melakukan pembakaran Al-Qur’an di depan kantor kedutaan Turki yang berada di Stockholm. Hal ini menimbulkan kecaman terhadap Swedia, Presiden Recep Tayyip Erdogan marah dan mendesak Swedia untuk mengambil langkah tegas terhadap penistaan agama yang terjadi, kejadian ini juga menandakan runtuhnya kepercayaan Turki yang dapat menyebabkan Turki enggan untuk meratifikasi keanggotaan Swedia di NATO. Swedia merespon hal tersebut dengan meminta maaf terkhusus kepada umat muslim sedunia, melalui Perdana Menteri Ulf Kristersson yang juga mengecam adanya aksi tersebut di Stockholm. (Arbar, 2023). Ulf Kristersson selaku Perdana Menteri Swedia juga memberikan argumen tentang kesiapannya dalam memulai kembali negosiasi yang sempat terputus karena aksi demonstrasi dengan negara Turki, karena sampai saat ini Turki masih

belum meratifikasi keanggotaan Swedia di NATO, terlepas pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan Turki sehingga fokus kebijakan lebih terarah ke dalam negeri. (Jaramaya, 2023).

Sehingga pada bulan Maret 2023, Swedia melakukan adopsi rancangan undang-undang NATO tentang keanggotaannya, dilanjutkan pengajuan rancangan undang-undang tersebut ke Riksdag, dan pada 22 Maret Riksdag menyetujui aksesinya negara Swedia terhadap NATO. Pada bulan berikutnya tepatnya pada 4 April 2023 negara tetangga Swedia yaitu Finlandia secara resmi menjadi anggota NATO setelah aksesinya permohonannya disetujui dalam waktu yang singkat oleh negara-negara pakta pertahanan tersebut. (Johnson et al., 2023)

Pembakaran Al-Qur'an yang terjadi di Swedia menyebabkan ketegangan bagi negara muslim dan juga hubungan Swedia dengan Turki, peristiwa tersebut juga berdampak kepada dialog Swedia-Turki tentang NATO terhenti. Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan mengutuk Swedia terhadap apa yang telah terjadi di negaranya. Hal ini menyebabkan dilema baru bagi Swedia pasalnya negara tetangga Finlandia sudah resmi lebih dahulu menjadi anggota NATO. (Shankar, 2023)

Bertepatan dengan hal tersebut, pada bulan Mei 2023 merupakan hari terselenggaranya pemilihan umum presiden di Turki. Carl Bildt yang merupakan mantan Perdana Menteri Swedia beranggapan bahwa belum adanya kejelasan tentang ratifikasi keanggotaan Swedia di NATO sebelum adanya informasi terkait siapa yang akan menjadi Presiden Turki selanjutnya, oleh karena itu Swedia sangat menantikan momentum setelah pemilihan umum guna mempercepat akses

Swedia menjadi anggota NATO sebelum pertemuan KTT NATO di Lithuania pada Juli mendatang.

Namun cepat atau lambat, menurut Sinan Ogan kandidat dari *Nationalist Ancestral Alliance* hanya berbicara tentang waktu kapan Turki meratifikasi keanggotaan Swedia, adanya hasil pemilu yang diadakan tidak merubah secara drastis arah kebijakan Turki terhadap keanggotaan Swedia. Walaupun belakangan ini terjadi pembakaran Al-Quran di Swedia dan juga adanya protes anti Erdogan disana, Bildt mengatakan bahwa masyarakat negara Swedia tidak memberikan dukungan terhadap aktivitas islamophobia tersebut, dan apabila Turki tetap ingin menolak Swedia untuk menjadi anggota NATO, apakah dengan tindakan tersebut akan menghentikan Islamophobia dan kekerasan lainnya, dan apakah tindakan tersebut dengan menolak akses Swedia akan membuat Turki lebih aman?. Namun dengan berakhirnya pemilu yang dimenangkan kembali oleh Presiden Erdogan menandakan Turki masih memiliki karakteristik kebijakan seperti yang dahulu. (Shankar, 2023)

Tidak sampai disana, 28 Juni 2023 bertepatan dengan perayaan Idul Adha, terjadi lagi aksi pembakaran Al-Qur'an oleh Salwan Momika di depan masjid besar yang ada di Stockholm sebagai bentuk dalam kebebasan berpendapat, hal ini memicu adanya kemarahan dari Turki dan dunia, Presiden Recep Tayyip Erdogan lagi lagi mengancam Swedia dan menegaskan untuk memerangi segala bentuk tindakan Islamophobia (DetikNews, 2023). Swedia merupakan negara yang menerapkan hukum yang sangat melindungi kebebasan berekspresi di bawah undang-undang bebas pendapat, ditambah pada 1970-an Swedia menghapus adanya pasal larangan untuk menghina segala bentuk penistaan terhadap simbol

agama, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson yang melihat kejadian tersebut sebagai potensi membahayakan terhadap prospek Swedia ke depan, namun pada 12 Oktober lalu pengadilan Swedia secara tegas memvonis bersalah seorang pria yang melakukan tindakan kebencian dan hasutan terhadap etnis tertentu yaitu dengan melakukan pembakaran Al-Quran, hal ini menandakan bahwa Swedia sudah menjadi negara yang mengutuk segala bentuk penistaan agama tanpa mengurangi nilai kebebasan berpendapat (Lacy, 2022)

Pada 10 Juli 2023, sehari sebelum KTT NATO di Vilnius, terjadi pertemuan kembali antara Turki dan Swedia sama seperti tahun lalu sehari sebelum terlaksananya KTT Madrid. Finlandia yang sudah terlebih dahulu menjadi anggota NATO karena memenuhi bagiannya dalam perjanjian kemarin. Namun beda dengan Swedia, negara ini harus bertemu kembali dan bernegosiasi terkait masalah yang terjadi, terlepas dari adanya konflik yang menyebabkan mandeknya keputusan Turki untuk meratifikasi Swedia. Pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Jens Stoltenberg selaku Sekretaris Jenderal NATO dan Ulf Kristersson Perdana Menteri Swedia menghasilkan beberapa poin yaitu

1. Penguatan kerjasama yang dilakukan Swedia terhadap Turki setelah KTT NATO tahun 2022 dalam proses untuk mengatasi keresahan Turki tentang keamanan nasional negaranya. Sesuai dengan perjanjian Trilateral bersama Finlandia dan Turki, Swedia telah mengubah konstitusi dan undang-undangnya serta berkomitmen kuat untuk tidak mendukung gerakan terorisme

seperti PKK ditambah dengan adanya ekspor senjata ke Turki yang memperkuat bentuk kerjasama yang terjalin.

2. Swedia dan Turki sepakat untuk melanjutkan kerjasama gabungan Trilateral yang dibentuk ketika KTT NATO 2023 di Madrid, dimana akan ada pertemuan setingkat menteri dan kelompok kerja yang akan diadakan pada setiap tahun, sebagai rapat pembuka Swedia akan memberikan peta jalan upaya berkelanjutan dalam melawan gerakan terorisme.
3. Swedia dan Turki setuju adanya kerjasama tentang kontra terorisme dalam bentuk jangka panjang bahkan setelah Swedia menjadi anggota resmi NATO, dilain sisi NATO juga akan bersikap tegas terhadap segala bentuk terorisme dan akan membentuk koordinator khusus untuk pencegahan terorisme.
4. Komitmen yang terjadi antara Swedia dan Turki untuk tidak adanya pembatasan, sanksi, serta hambatan terhadap kerjasama investasi dan perdagangan yang terjadi di antara Turki dan Swedia.
5. Peningkatan kerjasama pada aspek ekonomi oleh Swedia dan Turki melalui *Joint Economic and Trade Committee* (JETCO). Swedia dan Turki berupaya dengan maksimal untuk meningkatkan peluang perdagangan dan investasi di antara kedua negara. Swedia juga akan memberikan dukungan penuh terhadap Turki terkait upaya untuk mengaktifkan kembali akses keanggotaan Turki di Uni Eropa, juga di dalamnya liberalisasi visa dan modernisasi Serikat Pabean UE-Turkiye.

6. Berdasarkan kesepakatan yang telah terjadi antara Turki dan Swedia dalam rangka menjaga keamanan kawasan Euro-Atlantik. Turki akan menyetujui protokol aksesinya Swedia kepada Majelis Agung Nasional dan akan memastikan ratifikasi tersebut berjalan sesuai dengan keinginan bersama.

Puncak perjalanan keanggotaan Swedia di NATO ada pada bulan oktober, tepatnya pada tanggal 23 dimana Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani protokol aksesinya Swedia untuk menjadi anggota NATO, dimana setelahnya berkas aksesinya tersebut akan diserahkan kepada parlemen Turki. Dengan ini menandakan perjalanan panjang Swedia menjadi anggota NATO sudah ada di depan mata dan tinggal menunggu waktunya saja. Swedia yang memenuhi memorandum trilateral membuat Turki luluh dan menyetujui aksesinya masuknya Swedia ke NATO (Maharani, 2023).

BAB 3

STRATEGI *PROBLEM SOLVING* YANG DILAKUKAN NEGARA SWEDIA DALAM MENDORONG NEGARA TURKI UNTUK MERATIFIKASI KEANGGOTAAN NATO

Bab 3 dalam skripsi ini akan membahas tentang strategi negosiasi negara Swedia terhadap Turki dalam upaya untuk meratifikasi keanggotaan negara Swedia di NATO dengan menggunakan kerangka teoritis *Strategies and Tactics in Negotiation* karya (Carnevale & Pruitt, 1993) dalam buku *Negotiation in Social Conflict* yang akan berpusat untuk menjawab pertanyaan “Bagaimana Strategi Negosiasi Negara Swedia Terhadap Negara Turki dalam Meratifikasi Keanggotaan NATO tahun 2023?”, dengan fokus penggunaan strategi *Problem Solving* yang dilakukan Swedia terhadap Turki.

Sejak abad ke-17, Turki dan Swedia menjalin hubungan bilateral yang dapat dikatakan baik, hal tersebut ditandai dengan berbagai kerjasama dan penandatanganan kesepakatan yang terjadi antara kedua negara dalam aspek ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. Namun hubungan antara Turki dan Swedia tidak sebaik itu dalam aspek militer atau keamanan. Masuknya Swedia menjadi anggota NATO mendapatkan penolakan oleh Turki sehingga Swedia melakukan upaya untuk bernegosiasi dengan Turki menggunakan strategi *Problem Solving* untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. (“Relations between Türkiye and Sweden / Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs”, n.d.)

Problem Solving merupakan salah satu strategi untuk mencapai kesepakatan yang bersifat *Win-win solution* atau mencapai kepentingan bersama antara kedua belah pihak yang bernegosiasi atau lebih. Dalam strategi ini kedua belah pihak akan bekerja sama untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada melalui kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan. Terdapat 3 bentuk cara umum dalam membangun sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan, cara tersebut adalah *Exchanging Concessions*, *Solving underlying concerns*, dan *Expanding the pie* dengan tujuan yang sama yaitu adanya kesepakatan bersama. (Carnevale & Pruitt, 1993, 36)

3.1. Upaya Swedia Dalam Mendorong Turki Meratifikasi Keanggotaan NATO Dilihat Melalui Strategi *Exchanging Concessions*

Exchanging concession adalah salah satu bentuk cara dari strategi *Problem Solving* dalam mencapai kondisi yang *win-win solution* dengan masing-masing pihak bertukar konsesi mengenai permasalahan-permasalahan dengan isu yang berbeda yang terjadi diantara kedua belah pihak atau lebih. Perbedaan permasalahan yang terjadi, akan berpengaruh kepada konsesi yang diberikan, sehingga akan ada perbedaan pandangan tentang prioritas isu dalam sebuah negosiasi yang terlaksana, isu tertentu dipandang rendah oleh sebuah negara namun memiliki prioritas yang tinggi pada negara lain. Sebagai sebuah contoh pada perusahaan percetakan dimana 500 pesanan buku mendapat prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan 1000 buku, 500 buku dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan dan 1000 buku membutuhkan 2 bulan untuk penyelesaian sehingga dapat diasumsikan bahwa pesanan 500 menjadi prioritas tinggi pada pihak lain.

Pada Rabu 18 Mei 2022 Swedia dan Finlandia secara resmi mendaftarkan negaranya untuk bergabung ke dalam *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang mengubah riwayat negara netral dan tidak berpihak yang sudah lama melekat kepada dua negara tersebut. Namun, dilain sisi negara Turki yang merupakan salah satu anggota NATO menolak akses Swedia dan Finlandia tersebut karena Turki beranggapan bahwa Swedia dan Finlandia merupakan negara yang mendukung gerakan terorisme dari partai PKK Kurdi, sehingga dengan adanya akses terhadap kedua negara tersebut menjadi negara anggota NATO dapat menyebabkan gangguan keamanan nasional negara Turki. Sebagaimana menteri luar negeri Turki, Mevlut Cavusoglu yang memberikan statement kepada media bahwa jelas adanya alasan Turki menolak kedua negara tersebut menjadi anggota NATO, melihat kepada NATO yang memiliki prinsip *Open door policy*, berbeda halnya dengan Swedia dan Finlandia yang sejak awal sudah mendukung PKK, ini memiliki dampak yang negatif, bagaimana bisa sebuah negara yang mendukung gerakan teroris yang menyerang kedaulatan dan mengganggu keamanan Turki dapat menjadi partner atau rekan dalam sebuah organisasi. (gazete duvar, 2022)

Melihat kepada bentuk cara *Exchanging Concession* adanya upaya yang dilakukan negara Swedia kepada Turki agar meratifikasi keanggotaan negara Swedia di NATO. Swedia akan melakukan upaya melalui strategi *Exchanging Concession* terhadap Turki agar tujuan negara tersebut tercapai untuk menjadi anggota NATO. Swedia mengupayakan pertemuan-pertemuan terhadap Turki bersama Finlandia untuk membahas masalah tersebut serta kekhawatiran apa yang menyebabkan Turki belum bisa menerima kedua negara baltik ini menjadi

anggota NATO, hal tersebut dapat dilihat pada upaya yang dilakukan oleh Swedia dalam rapat negosiasi yang dilaksanakan pada 28 Juni 2022 dihadiri oleh perwakilan dari Swedia, Turki, dan Finlandia dibawah naungan Jens Stoltenberg, Sekretaris Jenderal NATO sehingga tercipta memorandum trilateral.(Donmez, 2022)

Adapun pertemuan-pertemuan berikutnya yang membahas lebih lanjut tentang sudah sejauh mana pemenuhan janji antara Swedia dengan Turki sesuai dengan memorandum trilateral yang sudah disepakati. Hubungan negosiasi antara Turki dan Swedia sempat memiliki hambatan pada awal hingga pertengahan tahun 2023, dengan adanya hal tersebut adanya pertemuan yang diadakan pada 10 Juli 2023 sehari sebelum KTT NATO di Lithuania. Pertemuan antara Turki dan Swedia menghasilkan beberapa poin tambahan yang memperkuat kerjasama kedua negara dan menimbulkan kepercayaan diantara keduanya, adapun hal ini merupakan upaya negara Swedia untuk menjadi anggota NATO. (Maharani, 2023).

Upaya yang dilakukan Swedia terhadap Turki melalui strategi *Problem solving* dengan cara *Exchanging concessions* menurut Dean G. Pruitt dapat dikatakan sesuai karena antara Swedia dan Turki telah melakukan pertukaran konsesi yang terjadi dalam mencapai kesepakatan bersama, dengan adanya pertemuan yang terjadi pada 28 Juni 2022 dan 10 Juli 2023, Swedia, Finlandia, dan Turki membahas secara tertulis dan menjadi memorandum Trilateral tentang kesepakatan-kesepakatan yang akan terjalin dan permasalahan yang akan diselesaikan secara bersama.

Menurut Dean G. Pruitt berbicara mengenai *Exchanging concession* dalam *Problem Solving* agar tercapainya sebuah negosiasi dan menghasilkan kesepakatan bersama, seorang negosiator harus memberikan prioritas lebih terhadap tuntutan lawan, dalam hal ini Swedia juga memberikan jaminan pemenuhan janji yang sudah tertulis dalam memorandum trilateral dan Swedia mau mengalah untuk memprioritaskan keinginan Turki tentang sikap kontra terorisme yang ada di negara Swedia. Sehingga dapat dikatakan upaya yang dilakukan Swedia terhadap Turki sudah sesuai dengan bentuk *Exchanging Concession* dalam strategi *Problem Solving* (Carnevale & Pruitt, 1993, 36-37).

3.2. Upaya Swedia Dalam Mendorong Turki Meratifikasi Keanggotaan NATO Dilihat Melalui Strategi *Expanding the pie*

Bentuk kedua dalam strategi *Problem Solving* adalah *Expanding the pie* atau memperluas pai. Cara ini dapat diartikan dengan peningkatan sumber daya yang tersedia oleh kedua belah pihak, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat diperoleh. Pai disini memiliki artian yaitu sumber daya yang dimiliki, sehingga dengan adanya peningkatan sumber daya yang terjadi kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan solusi yang saling menguntungkan atau *win-win solution*. Sebagai contoh pengusaha laundry yang menerima pesanan cucian hingga 1000 pakaian akan menambah kapasitas perusahaannya baik seperti penambahan jumlah sumber daya manusia hingga pembelian alat alat cuci yang mendukung serta menyelesaikan permasalahan yang ada (Carnevale & Pruitt, 1993, 36)

Upaya yang dilakukan oleh Swedia terhadap Turki dalam meratifikasi keanggotaan Swedia di NATO menggunakan strategi *Problem Solving* dengan bentuk *Expanding the pie* bisa dikatakan telah dilakukan oleh Swedia. Pada 10 Juli 2023, terjadi pertemuan antara Ulf Kristersson yang merupakan Perdana Menteri Swedia, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Jens Stoltenberg sekretaris jenderal NATO. Dalam pertemuan ini adanya pembahasan tentang dinamika kerjasama yang telah terjadi antara Swedia dan Turki, dimana keamanan nasional merupakan sebuah landasan dari adanya forum diplomasi dan negosiasi yang terjadi, terorisme merupakan ancaman bagi setiap negara, terutama *Partiya Karkeren Kurdistan* (PKK) yang merupakan kelompok terorisme yang telah mengancam kedaulatan Turki. (Antara news, 2023).

Upaya yang dilakukan Swedia dalam bentuk *Expanding the pie* dapat dilihat pada hasil dari memorandum trilateral yang telah dilaksanakan dan disepakati antara Swedia dan Turki adapun kesepakatan yang sesuai dengan bentuk *Expanding the pie* meliputi:

1. Swedia sepakat untuk tidak melakukan embargo senjata kepada Turki
2. Swedia akan mengubah dan memperkuat konstitusi dan undang-undang negaranya sebagai komitmen dalam gerakan kontra terorisme
3. Adanya pembentukan pertemuan rutin tahunan yang akan dihadiri oleh aktor setingkat menteri dan membentuk sebuah kelompok kerja pada isu tertentu apabila diperlukan.

Kerjasama yang berawal tentang keamanan nasional yang terjadi antara Swedia dan Turki menjadi meluas seiring dengan adanya forum-forum diskusi yang dilakukan, pindah dari sektor keamanan menuju ekonomi, adanya

kesepakatan dalam peningkatan kerjasama ekonomi antara Swedia dan Turki melalui JETCO atau *Joint Economic and trade committee*, kedua negara akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ekonomi melalui perdagangan dan investasi bilateral (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2022). Lebih daripada itu, Swedia secara aktif akan selalu memberikan dukungan terhadap Turki dalam upaya untuk mengaktifkan kembali proses aksesinya Turki menjadi anggota UE, termasuk didalamnya modernisasi serikat pabean UE-Turkiye dan juga diberlakukan liberalisasi visa Turki ke negara-negara anggota UE (NATO, 2023).

Strategi *Problem Solving* dengan bentuk *Expanding the pie* menurut Dean G. Pruitt adalah bentuk cara penyelesaian masalah dengan hasil yang sama-sama menguntungkan atau *win-win solution* yang menghasilkan keinginan dan mencapai tujuan bersama dengan cara memperluas sumber daya yang ada. Swedia dengan tegas mengubah undang-undang dan konstitusi negaranya sebagai komitmen terhadap gerakan teroris PKK yang mengancam Turki, berhenti melakukan embargo senjata. lalu adanya ekspor senjata yang dilakukan Swedia terhadap Turki, hal ini menandakan adanya penerapan strategi *Expanding the pie* yang dilakukan Swedia terhadap Turki dan terlaksana dengan baik.

Penerapan bentuk *Expanding the pie* tidak hanya dalam aspek keamanan negara namun juga meluas kepada ekonomi. adanya kesepakatan dalam kerjasama ekonomi bilateral Swedia-Turki melalui (JETCO) serta upaya Swedia untuk mendukung Turki untuk menjadi anggota UE dan liberalisasi visa merupakan salah satu bentuk *Expanding the Pie* yang dilakukan Swedia. Swedia membuka lebih banyak alternatif yang dapat memberikan manfaat kepada kedua belah pihak

sehingga terjadi komunikasi dan kolaborasi yang konstruktif atas perluasan sumber daya yang ada.(NATO, 2023).

3.3. Upaya Swedia Dalam Mendorong Turki Meratifikasi Keanggotaan

NATO Dilihat dalam bentuk *Solving Underlying Concerns*

Bentuk ketiga dari strategi *Problem Solving* karya Dean. G. Pruitt adalah *Solving Underlying Concern* yang merupakan bentuk strategi dengan mencari titik temu atau dasar permasalahan dari masing-masing pihak yang terlibat, dengan adanya hal ini akan terciptanya pengetahuan baru atau informasi tentang apa yang sebenarnya menjadi keresahan pihak lawan, karena *Solving underlying concerns* juga digunakan untuk menanyakan masalah mendasar dan yang menjadi dasar keresahan dari pihak lawan sehingga pihak lain juga dapat mengambil posisi dan keputusan yang tidak hanya berlandaskan dari kepentingan nasionalnya saja namun juga kepentingan dari pihak lawan, dalam bentuk ini pihak ketiga juga turut serta dapat berpartisipasi bisa sebagai penengah, atau mediator terkait masalah yang terjadi. Masalah yang mendasar antara konflik Swedia dan Turki adalah bahwa masing-masing negara sedang berjuang untuk mempertahankan keamanan nasional negaranya. Swedia bertahan dari kekhawatiran Invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina dan akan berdampak terhadap negaranya, dilain sisi Turki mempertahankan kedaulatan negaranya dari ancaman gerakan terorisme PKK (Carnevale & Pruitt, 1993, 38-39)

Strategi dalam bentuk *Solving underlying concerns* yang dilakukan oleh Swedia dapat dilihat melalui upaya-upaya Swedia yang mau membuka diri dan memahami permasalahan mendasar negara Turki menolak akses keanggotaan

NATO karena menganggap Swedia sebagai sarang atau rumah bagi para teroris. Swedia memang negara yang memiliki hubungan dengan *Partiya Karkeren Kurdistan* (PKK), salah satu gerakan teroris yang mengancam Turki. Tercatat sejak tahun 2016 berbagai kelompok teroris baik PKK (*Partiya Karkeren Kurdistan*), YPG (*Yekineyen Parastina Gel*), dan PYD (*Partiya Yekitiya Demokrat*) memiliki kantor di Stockholm dan memperoleh pendapatan melalui pencucian uang, narkoba, dan perdagangan senjata, lebih dari itu Swedia secara berkala mengirimkan delegasi untuk berbicara dan berdiskusi terhadap aktifis-aktifis PKK (Aydogan, 2022)

PKK merupakan organisasi teroris internasional yang telah dilarang oleh berbagai negara di Eropa terutama di Turki, adanya intimidasi, gerakan separatisme dan demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok ini dapat mengganggu stabilitas keamanan Turki selama bertahun-tahun. PKK juga memiliki markas dan afiliasi yang tidak hanya terpusat di Turki, namun juga tersebar di negara-negara Timur Tengah seperti Irak, Iran, dan salah satunya di Suriah. PYD (*Partiya Yekitiya Demokrat*) dan YPG (*Yekineyen Parastina Gel*) merupakan cabang dari PKK yang berafiliasi secara nyata, didirikan sejak tahun 2003 organisasi tersebut memiliki persamaan dengan PKK dalam struktur organisasi, taktik dan strategi militer, pusat pelatihan sampai kader kepemimpinan. Hal tersebut yang menjadikannya sebagai organisasi terorisme yang dilarang di berbagai negara Eropa. (Republic Of Turkiye Ministry of Foreign Affairs, 2022)

Melalui diplomasi sengit yang dilakukan Swedia terhadap Turki pada 28 Juni 2022, sehari sebelum KTT Madrid dilaksanakan, dalam forum tersebut

menghasilkan memorandum trilateral yang menjawab permasalahan mendasar Turki tentang kekhawatiran negara tersebut terhadap gerakan terorisme PKK dan gerakan terorisme lainnya yang ada di negara Swedia. Pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, menjadi pertemuan pembuka jalan pemahaman antara ketiga negara dengan keamanan nasional sebagai dasar permasalahannya, hal ini juga berdampak dalam KTT NATO sehari setelahnya dengan memberikan komitmen perang melawan gerakan terorisme dan pencegahannya sebagai sebuah tantangan ke depan. (NATO, 2022)

Swedia mengambil langkah tegas dengan menyetujui adanya ekstradisi pendukung gerakan terorisme PKK Kurdi ke Turki sebagai hasil dari kesepakatan memorandum trilateral dan juga jawaban atas keresahan Turki tentang ancaman PKK terhadap keamanan nasionalnya. Pada bulan Desember 2022, Swedia melakukan ekstradisi Mahmut Tat yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan Turki karena diindikasikan merupakan anggota PKK. (MacDonald et al., 2023). Amerika Serikat juga memainkan peran ketiga dalam memahami permasalahan mendasar bagi Turki, Joe Biden yang merupakan Presiden Amerika Serikat memberikan lampu hijau untuk menjual jet tempur F-16 buatan AS kepada Turki setelah Presiden Erdogan menyetujui Swedia untuk bergabung NATO, adanya persetujuan ini ujar Joe Biden sebagai upaya untuk memperkuat kekuatan militer NATO. Hal ini menandakan bahwa AS berupaya untuk memahami permasalahan Turki dan mendukung masuknya Swedia menjadi anggota NATO (CNN, 2023).

Upaya yang dilakukan oleh Swedia menggunakan bentuk *Exchanging concessions* dalam strategi *Problem solving* dapat dikatakan sesuai dengan pendekatan Dean G. Pruitt. Swedia telah melakukan pertemuan dan membahas

permasalahan mendasar negara Turki yang menolak akses keanggotaannya di NATO. Swedia memainkan perannya untuk menjawab permasalahan Turki dengan menyetujui menyetujui memorandum trilateral, dan melakukan ekstradisi sebagai pemenuhan kesepakatan tersebut. Menurut Dean G. Pruitt perlu adanya pemeriksaan tentang kekhawatiran mendasar terhadap satu pihak, karena jika kekhawatiran itu terpenuhi maka pihak tersebut akan menerima tuntutan pihak lain, hal ini juga sudah sesuai dengan apa yang dilakukan Swedia terhadap Turki. NATO dan AS juga berperan menjadi pihak ketiga dalam menjawab permasalahan mendasar negara Turki, NATO mendukung gerakan untuk memberantas kelompok terorisme ditambah adanya solusi yang hadir dan menjadi nilai tambah bagi kedua belah pihak yang berdampak kepada NATO yaitu pembentukan komite khusus koordinator pemberantas terorisme yang bermanfaat bagi Turki maupun Swedia dan meluas dampaknya kepada seluruh anggota NATO serta AS yang menyetujui penjualan jet tempur F-16 setelah Turki menyetujui masuknya Swedia menjadi anggota NATO. (Carnevale & Pruitt, 1993, 39).

Tabel 3.3 Analisis Strategi *Problem Solving* Swedia Terhadap Turki

<p>Strategi <i>Problem Solving</i> menurut Dean. G. Pruitt</p>	<p>Penjelasan Bentuk Strategi</p>	<p>Upaya yang dilakukan Swedia</p>
---	--	---

<p style="text-align: center;"><i>Exchanging Concession</i></p>	<p><i>Exchanging Concession</i> atau pertukaran konsesi adalah suatu cara dari strategi <i>Problem Solving</i> untuk menyelesaikan masalah dengan bertukar konsesi antara pihak yang sedang bernegosiasi. Dengan adanya pertukaran konsesi akan menghasilkan sebuah isu yang dapat menjadi prioritas tinggi pada pihak lain, dan prioritas rendah terhadap dirinya ataupun sebaliknya. Bentuk ini mengupayakan adanya <i>Win-win solution</i> dalam menyelesaikan sebuah masalah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Swedia bersama Finlandia melakukan pertemuan bersama Turki, dihadiri oleh Sekretaris Jenderal NATO berbicara mengenai permasalahan yang terjadi dan menghasilkan memorandum Trilateral. 2. Swedia bersedia untuk memenuhi isi perjanjian trilateral tersebut terhadap Turki dengan mengancam segala bentuk gerakan terorisme yang ada di negaranya, dan memberikan prioritas utama terhadap keresahan Turki terkait keamanan nasionalnya.
<p style="text-align: center;"><i>Expanding the Pie</i></p>	<p><i>Expanding the pie</i> atau memperluas pai adalah salah satu bentuk cara dari strategi <i>Problem Solving</i> dengan analogi memperluas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Swedia memperkuat konstitusi dan undang-undang negaranya tentang gerakan terorisme

	<p>pai. Pai disini berarti sumber daya, dimana dengan adanya peningkatan dan perluasan sumber daya diharapkan adanya perluasan kerjasama dalam mencapai tujuan masing masing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Swedia tidak lagi melakukan embargo senjata terhadap Turki 3. Ekspor senjata Swedia kepada Turki 4. Dalam sektor ekonomi adanya kerjasama ekonomi bilateral Swedia-Turki melalui JETCO 5. Swedia secara aktif mendukung aktivasi keanggotaan Turki dalam Uni Eropa
<p><i>Solving Underlying Concerns</i></p>	<p><i>Solving Underlying Concerns</i> adalah sebuah bentuk cara dengan mencari dasar permasalahan dari pihak-pihak yang sedang bernegosiasi. Adanya pihak ketiga yang ikut dalam permasalahan dapat dilakukan melalui bentuk ini, dengan harapan adanya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan antara Swedia, Finlandia, dan Turki yang membahas tentang permasalahan mendasar yaitu Keamanan Nasional. 2. Swedia melakukan ekstradisi terhadap aktivis Kurdi ke Turki 3. NATO dan AS menjadi pihak ketiga dalam

	<p>pemahaman antara kedua belah pihak mengenai permasalahan yang mendasar yang menyebabkan konflik sehingga dapat diselesaikan secara bersama.</p>	<p>membantu Swedia menyelesaikan masalah dengan Turki. NATO membentuk Koordinator Khusus Pemberantas Terorisme dan AS mengirimkan jet tempur F-16 buatannya kepada Turki.</p>
--	--	---

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Perlu adanya upaya dari pemerintah Swedia untuk mendorong Turki agar menyetujui aksesi masuknya Swedia menjadi anggota resmi NATO semenjak adanya invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, dilain sisi Turki merasa keamanan negaranya terancam apabila menyetujui masuknya Swedia menjadi anggota NATO, pasalnya Swedia merupakan negara yang mendukung gerakan PKK Kurdi yang dicap sebagai gerakan terorisme di Turki. Rumusan masalah yang coba dijawab pada penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Negosiasi Negara Swedia Terhadap Negara Turki dalam Meratifikasi Keanggotaan NATO tahun 2023?”.

Strategi yang dilakukan Swedia terhadap Turki dalam upaya untuk meratifikasi keanggotaan Swedia di NATO dapat dilihat melalui *Strategy and Tactic in Negotiation* menggunakan strategi *Problem Solving*. Bentuk ini mengedepankan kepentingan bersama dan bersifat *Win-win solution* sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Penyelesaian masalah dilakukan secara bersama setelah adanya pemetaan dan prioritas masalah yang harus diselesaikan. Pada bentuk *Problem Solving* dibagi menjadi 3 cara yaitu *Exchanging Concession*, *Expanding the Pie*, dan *Solving Underlying Concerns*.

Exchanging Concession bisa diartikan dengan bertukar konsesi tentang permasalahan atau isu-isu yang ada, dimana masing-masing pihak dapat melihat kepada prioritas isu dari pihak lainnya. Isu yang dilihat menjadi prioritas utama pada pihak yang satu bisa saja menjadi prioritas rendah pada pihak lainnya.

Melihat upaya Swedia menggunakan bentuk strategi ini, dengan adanya forum pertemuan yang diadakan pada 28 Juni 2022 yang menghasilkan penandatanganan perjanjian Trilateral, dan pertemuan dengan Turki sehari sebelum KTT NATO di Lithuania 2023 menandakan Swedia sudah melakukan bentuk *Exchanging Concession* terhadap Turki. Pasalnya dalam forum pertemuan tersebut terjadi pertukaran konsesi tentang keresahan-keresahan yang terjadi diantara negara-negara yang terlibat. Swedia memberikan jaminan terhadap pemenuhan janji yang telah disepakati, ditambah juga Swedia memberikan prioritas yang tinggi terhadap permasalahan yang dialami oleh Turki.

Bentuk kedua dalam strategi *Problem Solving* adalah *Expanding the Pie* atau memperluas pai. Pai disini memiliki arti sebagai sumber daya, dimana dengan adanya sumber daya yang diperluas maka jalan panjang menuju kesepakatan bersama semakin menemukan titik terangnya. Dalam menggunakan bentuk ini, Swedia berupaya untuk memperluas atau meningkatkan sumber daya yang dimiliki dalam membangun kesepakatan dan kerjasama dengan Turki. Pada aspek keamanan Swedia mencabut embargo senjata terhadap Turki dan adanya penguatan undang-undang serta konstitusi tentang gerakan terorisme dan juga melakukan ekspor senjata ke Turki. Lebih daripada itu melalui aspek ekonomi Swedia melakukan penguatan kerjasama ekonomi dengan Turki melalui JETCO dan juga Swedia berperan aktif untuk mendukung Turki menjadi anggota UE.

Bentuk ketiga dalam strategi *Problem Solving* adalah *Solving Underlying Concerns* yaitu bentuk strategi dengan mencari permasalahan mendasar dari masing-masing pihak yang sedang berkonflik. Dalam bentuk ini pihak ketiga juga memiliki peran untuk membantu penyelesaian masalah yang terjadi.

Sederhanakan bentuk ini dilakukan dengan menanyakan tentang masalah mendasar yang menyebabkan konflik bagi pihak lawan. Bisa kita lihat dalam konflik Swedia-Turki yang terjadi, pada awal pertemuan 3 negara Swedia, Turki, dan Finlandia dapat kita pahami bersama bahwa masalah yang mendasar dari masing-masing pihak adalah tentang keamanan nasionalnya. Turki tentang gerakan terorisme PKK Kurdi, Swedia dan Finlandia tentang Invasi Rusia ke Ukraina. Menggunakan bentuk ini Swedia membuka diri untuk bisa memahami lebih dalam masalah yang terjadi di Turki dan berupaya untuk mengurangi keresahan-keresahannya hal ini menurut bentuk *Solving Underlying Concerns* berdampak apabila masalah mendasar satu pihak dipenuhi maka ia akan memenuhi tuntutan-tuntutan yang ada, di lain sisi adanya peran aktor ketiga yaitu NATO dan Amerika dalam membantu mengatasi keresahan yang terjadi pada Turki.

NATO menjadi mediator dalam konflik ini yang menghasilkan perjanjian Trilateral dan Bilateral antara Turki dan Swedia. NATO juga memasukan amandemen tentang gerakan kontra terorisme pada forum KTT NATO di Madrid 2022 dan pada 2023 NATO mengupayakan pembentukan koordinator khusus pemberantas terorisme, dan juga AS yang sangat mengharapkan masuknya Swedia ke NATO membantu dengan mengirimkan pesawat jet tempur F-16 buatan AS terhadap Turki sebagai bentuk memperkuat regional rekan sesama anggota NATO.

4.2 Rekomendasi

Dari penelitian ini, tidak lepas dari beberapa keterbatasan yang berkesinambungan dengan topik penelitian yaitu strategi negara Swedia terhadap Turki untuk meratifikasi keanggotaan NATO tahun 2023. Fokus utama pada penelitian ini hanya menggunakan bentuk strategi *Problem Solving* dalam *Strategy and Tactics In Negotiation* karya Dean G. Pruitt, oleh karena itu penulis memiliki harapan terkait konflik yang terjadi antara Swedia dan Turki dapat ditinjau atau dianalisis lebih mendalam menggunakan teori-teori lainnya yang dapat memberikan pemahaman dan sudut pandang baru bagi para pembaca. Penulis juga merekomendasikan penelitian lebih lanjut dengan Turki sebagai objek dalam penelitian sehingga terlihat apa strategi yang digunakan oleh pihak Turki dalam menyelesaikan permasalahan ini, dan juga perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap perkembangan keanggotaan Swedia di NATO, karena sampai saat ini belum ada pernyataan resmi tentang keanggotaan Swedia di NATO.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Husnul. 2023. "Apa itu NATO? Kenali Sejarah Terbentuknya, Tujuan, dan Keanggotaannya."
<https://www.liputan6.com/hot/read/5307957/apa-itu-nato-kenali-sejarah-terbentuknya-tujuan-dan-keanggotaannya?page=4>.
- Antara news. 2023. "NATO kini punya Koordinator Khusus Pemberantasan Terorisme." Antaranews.com.
<https://www.antaranews.com/berita/3637143/nato-kini-punya-koordinator-khusus-pemberantasan-terorisme>.
- Arbar, Thea F. 2023. "Kronologi & Fakta-Fakta Pembakaran Alquran di Swedia." CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230124092456-4-407712/kronologi-fakta-fakta-pembakaran-alquran-di-swedia>.
- Aydogan, Merve. 2022. "Finland and Sweden: 'Guesthouses for terrorists.'" Anadolu Ajansı.
<https://www.aa.com.tr/en/europe/finland-and-sweden-guesthouses-for-terrorists/2588041>.
- BBC. 2022. "Mengapa Turki tidak ingin Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO?" BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61553448>.
- Berty, Teddy T. 2019. "Warga Stockholm Protes ke Jalan Terkait Keputusan Swedia Masuk NATO." YouTube.

<https://www.liputan6.com/global/read/4965229/warga-stockholm-protos-ke-jalan-terkait-keputusan-swedia-masuk-nato?page=4>.

Briney, Amanda. 2019. "Sweden: History and Geographic Facts." ThoughtCo.

<https://www.thoughtco.com/geography-of-sweden-1435614>.

Britannica. 2023. "Swedish Social Democratic Party (SAP) | History & Facts."

Britannica.

<https://www.britannica.com/topic/Swedish-Social-Democratic-Party>.

Brommesson, Douglas, Ann-Marie Ekengren, and Anna Michalski. 2022.

"Sweden's Policy Of Neutrality: Success Through Flexibility?" In

Successful Public Policy in the Nordic Countries, 284-305. N.p.: Oxford

Academic. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192856296.003.0014>.

Burchill, Scott. 2005. *The National Interest in International Relations Theory*.

N.p.: Palgrave.

Carnevale, Peter J., and Dean G. Pruitt. 1993. *Negotiation In Social Conflict*. N.p.:

California: Book/Cole Publishing Company Grove.

Chatterjee, Phelan. 2022. "Perjalanan Swedia dan Finlandia dari negara netral ke

NATO." BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61978858>.

Chatterjee, Phelan. 2023. "Mengapa Swedia dan Finlandia yang tadinya netral

kini bergabung dengan NATO?" BBC.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2vz601d6q1o>.

CNBC. 2023. "Finlandia Resmi Gabung NATO, Begini Respons Rusia." CNBC

Indonesia.

[https://www.cnbcindonesia.com/news/20230404181532-4-427331/finlandia](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230404181532-4-427331/finlandia-resmi-gabung-nato-begini-respons-rusia)

[a-resmi-gabung-nato-begini-respons-rusia](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230404181532-4-427331/finlandia-resmi-gabung-nato-begini-respons-rusia).

- CNBC. 2023. "Erdogan Tepati Janji, Beri Lampu Hijau Negara Ini Gabung NATO." CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231024103720-4-483133/erdogan-tepati-janji-beri-lampu-hijau-negara-ini-gabung-nato>.
- CNN. 2023. "Biden Restui Jual F-16 ke Turki usai Erdogan Legawa Swedia Masuk NATO." CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230711152105-134-972122/biden-restui-jual-f-16-ke-turki-usai-erdogan-legawa-swedia-masuk-nato>.
- DetikNews. 2023. "Motif Salwan Momika Bakar Al-Qur'an di Swedia Saat Idul Adha 2023." detikcom.
<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6802168/motif-salwan-momika-bakar-al-quran-di-swedia-saat-idul-adha-2023>.
- Donmez, Beyza B. 2022. "Ini isi perjanjian Finlandia dan Swedia untuk atasi masalah keamanan Turki." Anadolu Ajansı.
<https://www.aa.com.tr/id/dunia/ini-isi-perjanjian-finlandia-dan-swedia-untuk-atasi-masalah-keamanan-turki/2625411>.
- DW. 2023. "Erdogan Ancam Swedia Imbas Pembakaran Alquran – DW – 24.01.2023." DW.
<https://www.dw.com/id/erdogan-ancam-swedia-soal-keanggotan-nato-imb-ak-pembakaran-alquran/a-64494742>.
- DW. 2023. "Sweden Supreme Court: OK to send PKK supporter to Turkey – DW – 06/07/2023." DW.
<https://www.dw.com/en/sweden-supreme-court-approves-extradition-of-pkk-supporter-to-turkey/a-65854132>.

DW. 2023. "Setujui Swedia Gabung NATO, Erdogan Minta Turki Masuk UE – DW – 11.07.2023." DW.

<https://www.dw.com/id/setujui-swedia-gabung-nato-erdogan-minta-turki-masuk-ue/a-66184145>.

gazete duvar. 2022. "Çavuşoğlu: İki ülke PKK'ya destek veriyor, NATO'da bunu konuşmalıyız." Gazete Duvar.

<https://www.gazeteduvar.com.tr/cavusoglu-iki-ulke-pkky-destek-veriyor-natoda-bunu-konusmalyiz-haber-1564757>.

Georgetown University. 2019. "What's Behind Turkey's Reveal on Sweden's NATO bid? A Foreign Policy Professors Answers." *Discover & Impact*, March 9, 2019.

https://www-georgetown-edu.translate.goog/news/whats-behind-turkeys-reversal-on-swedens-nato-bid-a-foreign-policy-professor-answers/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wapp.

.government.se. 2023. "Sweden's path to NATO membership." Government.se.

<https://www.government.se/government-policy/sweden-and-nato/swedens-road-to-nato/>.

Handayani, Andina S. 2012. "Upaya Pemerintah Turki Dalam Mengatasi Gerakan Separatisme Suku Kurdi Tahun 1984-2007." (December).

Hidayat, Anwar. n.d. "Penelitian Kualitatif (metode) Penjelasan Lengkap."

<https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>.

"History of Sweden and NATO." 2023. Government.se.

<https://www.government.se/government-policy/sweden-and-nato/history-of-sweden-and-nato/>.

- Jaramaya, Rizky. 2023. "Swedia Siap Memulai Kembali Negosiasi dengan Turki |
Republika Online." Internasional | Republika Online Mobile.
<https://internasional.republika.co.id/berita/rpps5z383/swedia-siap-memulai-kembali-negosiasi-dengan-turki>.
- Jefriando, Maikel. 2023. "Aksi Bakar Al Quran Terjadi Lagi di Swedia, Turki
Ngamuk!" *CNBC Indonesia*, June 29, 2023.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230629104421-4-450059/aksi-bakar-al-quran-terjadi-lagi-di-swedia-turki-ngamuk>.
- Johnson, Simon, Huseyin Hayatsever, Anne Kauranen, and Nick Macfie. 2023.
"Why are Turkey and Hungary against Sweden joining NATO?" Reuters.
<https://www.reuters.com/world/europe/after-finland-joins-nato-why-is-turkey-making-sweden-wait-2023-04-04/>.
- Joshua, Parker. 2017. "The Neutral Ally: Sweden and the Social Construction of
Security Identity." *Political Science*.
- Jozwiak, Rikard. 2023. "Unpacking The NATO-Turkey-Sweden Deal." Radio
Free Europe.
<https://www.rferl.org/a/nato-turkey-sweden-takeaways/32498758.html>.
- Kauranen, Anne, and Johan Ahlander. 2022. "A brief history of Finland's and
Sweden's strained ties with Russia." Reuters.
<https://www.reuters.com/world/europe/brief-history-finlands-swedens-strained-ties-with-russia-2022-05-12/>.
- Kays, Sara. 2019. "NATO." YouTube.
https://www-nato-int.translate.google.com/nato-welcome/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.

- Kinasih, Sekar. 2022. "Benarkah Politik Luar Negeri Swedia Benar-Benar Netral?" Tirto.ID.
<https://tirto.id/benarkah-politik-luar-negeri-swedia-benar-benar-netral-grey>
- Kurnia, Tommy. 2019. "Internasional." Warga Turki Bakar Bendera Swedia, Protes Aksi Bakar Al-Qur'an.
<https://www.liputan6.com/global/read/5186781/warga-turki-bakar-bendera-swedia-protes-aksi-bakar-al-quran?page=2>.
- Lacy, Steve. 2022. ". " . - YouTube.
<https://www.thehindu.com/news/international/sweden-convicts-man-over-2020-koran-burning/article67411965.ece>.
- Lestari, Lidia I. 2023. "Skripsi." *Respon Turki Terhadap Aksesinya Finlandia dan Swedia dalam Keanggotaan NATO sebagai Taktik Negosiasi Konsesi dan Kompensasi*, (Oktober).
- Lidqvist, Karin. 2016. "'Cool Neighbours': How has Sweden's attitude towards Russia changed since the end of the Cold War?" *Bachelor's Thesis*, 22.
- The Local Sweden. 2014. "Sweden celebrates 200 years of peace - The Local." The Local Sweden.
<https://www.thelocal.se/20140815/sweden-celebrates-200-years-of-peace>.
- MacDonald, Alex, Fahrettin Altun, and Taha Ozhan. 2023. "Sweden approves extradition to Turkey of PKK supporter for drug offences." Middle East Eye.
<https://www.middleeasteye.net/news/sweden-turkey-approves-extradition-pkk-supporter-drug-offences>.

- Maharani, Esthi. 2023. "Erdogan Akhirnya Restui Permohonan Keanggotaan NATO Swedia | Republika Online." Internasional.
<https://internasional.republika.co.id/berita/s30px2335/erdogan-akhirnya-restui-permohonan-keanggotaan-nato-swedia>.
- Massaguni, Mahfud, Muhammad N. Badu, and Muhammad A. Sallatu. 2022. "Pengaruh Sanksi Uni Eropa Terhadap Rusia Atas Krisis Ukraina." *Journal of International Affairs* 2, no. 1 (February).
- NATO. 2022. "Türkiye, Finland, and Sweden sign agreement paving the way for Finnish and Swedish NATO membership." NATO.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_197251.htm.
- NATO. 2022. "News: 2022 NATO Summit, 28-Jun.-2022." NATO.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_196144.htm.
- NATO. 2022. "Finland and Sweden complete NATO accession talks." NATO.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_197737.htm.
- NATO. 2023. "Topic: Relations with Sweden." NATO.int.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52535.htm.
- NATO. 2023. "Press statement following the meeting between Türkiye, Sweden, and the NATO Secretary General." NATO.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_217147.htm.
- Olofsson, Magnus. 2008. "The Swedish Army in the Napoleonic Wars." The Napoleon Series.
https://www.napoleon-series.org/military-info/organization/Sweden/Organization/c_swedisharmy.html.

- Orange, Richard. 2022. "EXPLAINED: Why isn't Sweden part of the Nato security alliance?" The Local Sweden.
<https://www.thelocal.se/20220314/explained-why-isnt-sweden-part-of-nato-and-should-it-join-now>.
- Pakar, M. N. 2022. "Swedia Ekstradisi Terpidana Partai Pekerja Kurdistan ke Turkiye, Dukung Jadi Anggota NATO - Serambinews.com." Serambinews.com.
<https://aceh.tribunnews.com/2022/12/04/swedia-ekstradisi-terpidana-partai-pekerja-kurdistan-ke-turkiye-dukung-jadi-anggota-nato>.
- Parker, Joshua. 2017. "The Neutral Ally: Sweden and the Social Construction of Security Identity." (March).
- Putra, Alvin H. 2018. "STRATEGI KEAMANAN SWEDIA TERHADAP RUSSIA DI KAWASAN LAUT BALTIK." *Jurnal Hubungan Internasional*, 14-41.
- "Relations between Türkiye and Sweden / Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs." n.d. mfa.gov. Accessed December 28, 2023.
<https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkiye-and-sweden.en.mfa>.
- Republic Of Turkiye Ministry of Foreign Affairs. 2022. "PKK / Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs." (www.mfa.gov.tr).
<https://www.mfa.gov.tr/pkk.en.mfa>.
- Republic of Turkiye Ministry of Foreign Affairs. 2022. "Relations between Türkiye and Sweden / Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs." (www.mfa.gov.tr).
<https://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkiye-and-sweden.en.mfa>.

- Sari, Sri K., and A. Arifin. 2020. "Analisis Kudeta Militer Turki Tahun 2016." *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts* 3 (2): 10-16. 10.32734/lwsa.v3i3.911.
- Shankar, Priyanka. 2023. "What Turkey's elections mean for Sweden's NATO membership." Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2023/5/12/what-turkeys-elections-mean-for-swedens-nato-membership>.
- Simons, Greg, Andrey Manoylo, and Philipp Trunov. 2019. "Sweden and the NATO debate: views from Sweden and Russia." *Global Affairs* 5, no. 4-5 (October): 335-345. <https://doi.org/10.1080/23340460.2019.1681014>.
- TEPE, F. F. 2007. "SWEDISH NEUTRALITY AND ITS ABANDONMENT." Vol.6 (2): 193.
- Yakti, Probo D. 2016. "Kebutuhan Uni Eropa terhadap Institusi Keamanan: Peranan NATO di Era Kontemporer." *Jurnal Hubungan Internasional* 9, no. 1 (Januari-Juni): 81-85.
- Zuraya, Nidia. 2023. "Perjalanan Berliku Swedia Gabung NATO: Dihadang Turki Hingga Skandal Pembakaran Alquran | Republika Online." Visual | Republika Online Mobile. <https://visual.republika.co.id/berita/rozh88383/perjalanan-berliku-swedia-gabung-nato-dihadang-turki-hingga-skandal-pembakaran-alquran>.